

LPK-PHLN TW IV/2017



**LAPORAN KINERJA PELAKSANAAN
PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI
TRIWULAN IV TAHUN 2017**

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**



REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA PELAKSANAAN
PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI
TRIWULAN IV TAHUN 2017

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KATA PENGANTAR



Untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan yang dibiayai melalui Pinjaman/Hibah Luar Negeri dilakukan pemantauan dan penyusunan laporan sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah. Laporan Kinerja Pelaksanaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri ini ditujukan untuk memberikan gambaran perkembangan pencapaian output kegiatan, dan realisasi penyerapan anggaran selama satu triwulan berjalan. Selain itu, laporan ini juga memberikan informasi mengenai identifikasi permasalahan, rencana tindak lanjut, dan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek yang telah selesai berdasarkan laporan akhir proyek atau *Project Completion Report (PCR)*. Sebagai bahan pembelajaran

bagi pelaksanaan kegiatan Pinjaman/Hibah Luar Negeri lainnya, beberapa contoh pembelajaran (*lesson learned*) juga disampaikan dalam laporan ini.

Pada periode Triwulan IV Tahun 2017, persentase realisasi penyerapan terhadap target tahun 2017 mencapai 70,8 persen. Nilai ini lebih rendah 6,5 persen dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama di tahun 2016 sebesar 77,3 persen. Namun masih lebih tinggi dari rata-rata penyerapan lima tahun terakhir pada triwulan keempat, yaitu sebesar 66,4 persen. Menurunnya kinerja penyerapan tersebut, antara lain disebabkan penurunan persentase penyerapan yang cukup signifikan pada beberapa instansi, antara lain pada BPKP, Kemenag, Kemendes PDTT, Kemen KP, Kemen Kominfo, Kemen PUPR, Kementan, PT. PII, dan Pemprov DKI Jakarta. Berdasarkan kinerja dari masing-masing proyek, dalam Triwulan IV Tahun 2017, terdapat 48 proyek yang memiliki kinerja dengan penyerapan cukup baik, yaitu mampu menyerap di atas 52,5 persen dari target penarikan pinjaman. Beberapa kendala yang masih menjadi penyebab rendahnya kinerja proyek, antara lain permasalahan pembebasan lahan, pengadaan barang/jasa, kinerja kontraktor yang buruk, dan adanya gangguan cuaca yang ekstrim.

Dalam laporan Triwulan IV Tahun 2017 ini, terdapat beberapa *Lesson learned* atau pembelajaran pelaksanaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri, antara lain dari proyek *Coastal Community Development Project* pada Kemen KP yang memberikan pembelajaran tentang pentingnya pengaturan jadwal pelaksanaan proyek, pembagian tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan pusat, kemitraan dengan pihak ketiga, dukungan SDM lokal, dan penggunaan komunikasi elektronik dalam keberhasilan proyek pemberdayaan masyarakat pesisir. Pada *Sanimas Community-Based Sanitation Project in Indonesia* di Kemen PUPR, didapatkan pembelajaran mengenai pentingnya partisipasi, komitmen dan kontribusi dari masyarakat dan pemerintah dalam upaya mewujudkan keberhasilan pembangunan sarana sanitasi komunal.

Untuk memastikan manfaat proyek serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaannya, maka perlu dilakukan upaya perbaikan terhadap pengelolaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri secara berkelanjutan, baik dari sisi perencanaan, persiapan pelaksanaan proyek, maupun penyelesaian permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan proyek. Di samping itu, pembelajaran dan pengalaman (*lesson learned*) yang didapatkan selama siklus hidup proyek diharapkan dapat berguna untuk perbaikan dalam perencanaan maupun pelaksanaan selanjutnya. Sedangkan cara terbaik (*best practice*) yang didapatkan dapat disesuaikan serta diperluas atau direplikasi dengan sumber pendanaan lainnya sehingga berdampak lebih besar bagi masyarakat.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro



DAFTAR ISTILAH

ADB	: <i>Asian Development Bank</i>
AFD	: <i>Agence Francaise de Development</i>
BIG	: Badan Informasi Geospasial
BPKP	: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BP Batam	: Badan Pengusahaan Batam
BPS	: Badan Pusat Statistik
EU	: <i>European Union</i>
IDB	: <i>Islamic Development Bank</i>
IFAD	: <i>International Fund for Agricultural Development</i>
JBIC	: <i>Japan Bank for International Cooperation</i>
JICA	: <i>Japan International Cooperation Agency</i>
Kemenag	: Kementerian Agama
Kemendes PDTT	: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Kemen KP	: Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kemennaker	: Kementerian Ketenagakerjaan
Kemendikominfo	: Kementerian Komunikasi dan Informatika
Kemen PUPR	: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kemendikbud	: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kemenhub	: Kementerian Perhubungan
Kementan	: Kementerian Pertanian
Kemen PPN/Bappenas	: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kemenristekdikti	: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Kemenhan	: Kementerian Pertahanan
KSA	: Kreditor Swasta Asing
LIPi	: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
LPKE	: Lembaga Penjamin Kredit Ekspor
SLA	: <i>Subsidiary Loan Agreement</i> ; perjanjian penerusan pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemerintah Daerah
PT. PII	: PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia
PT. Pertamina	: PT. Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara
PT. PLN	: PT. Perusahaan Listrik Negara
PT. SMI	: PT. Sarana Multi Infrastruktur

Laporan Kinerja Pelaksanaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri disusun berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah. Laporan tersebut mencakup perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri (tidak termasuk pinjaman program) dan kegiatan hibah yang direncanakan serta hibah langsung. Kurun waktu pemantauan proyek dilakukan mulai dari proyek efektif (*effective date*) sampai dengan proyek selesai (*closing date*).

GAMBARAN UMUM

Pada akhir Triwulan IV Tahun 2017 (posisi 31 Desember 2017), nilai pinjaman luar negeri yang sedang berjalan (*on going*) adalah sebesar ekuivalen USD USD 17.307,0 juta, yang terdiri dari 182 proyek dan dilaksanakan oleh 18 Kementerian/Lembaga, 4 BUMN, serta 1 Pemerintah Daerah. Nilai pinjaman ini mengalami kenaikan sebesar USD 477,1 juta dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Kenaikan ini disebabkan karena adanya beberapa proyek yang baru efektif pada triwulan ini. Sedangkan beberapa proyek yang sudah ditandatangani namun belum efektif, tidak termasuk dalam proyek yang sedang berjalan (*on going*) yang dipantau dan dicantumkan dalam laporan ini.

Penyerapan kumulatif pinjaman sampai dengan Triwulan IV Tahun 2017 adalah sebesar USD 9.034,3 juta atau mencapai 52,2 persen dari total nilai pinjaman yang sedang berjalan. Sedangkan realisasi penyerapan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2017 adalah USD 2.002,5 juta atau mencapai 70,8 persen dari target 2017 sebesar USD 2.829,5 juta. Persentase penyerapan ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata penyerapan pada triwulan keempat dalam lima tahun terakhir, yaitu 66,4 persen. Kemajuan kinerja penyerapan proyek selama satu triwulan ini juga berjalan dengan cukup baik, yang diindikasikan dengan adanya sekitar 48 proyek yang mampu menyerap anggaran lebih dari 52,5 persen dari target penyerapan di tahun 2017. Namun, masih terdapat cukup banyak proyek yang sangat rendah penyerapannya atau bahkan belum mengalami penyerapan (penyerapan nol).

Rendahnya kinerja beberapa proyek disebabkan masih adanya sejumlah permasalahan, diantaranya adalah adanya gangguan cuaca yang ekstrim, rendahnya kinerja kontraktor, lambatnya proses pengadaan barang/jasa, dan permasalahan pembebasan lahan. Permasalahan pembebasan lahan tidak hanya disebabkan oleh sulitnya perijinan dan negosiasi ganti rugi warga terdampak, tetapi juga disebabkan kurangnya anggaran untuk pembayaran ganti rugi.

Dalam laporan ini juga disampaikan pembelajaran (*lesson learned*) dari proyek yang masih berjalan dan proyek yang sudah selesai, serta uraian kinerja pelaksanaan dari beberapa proyek hibah luar negeri khususnya hibah yang direncanakan.

PINJAMAN LUAR NEGERI

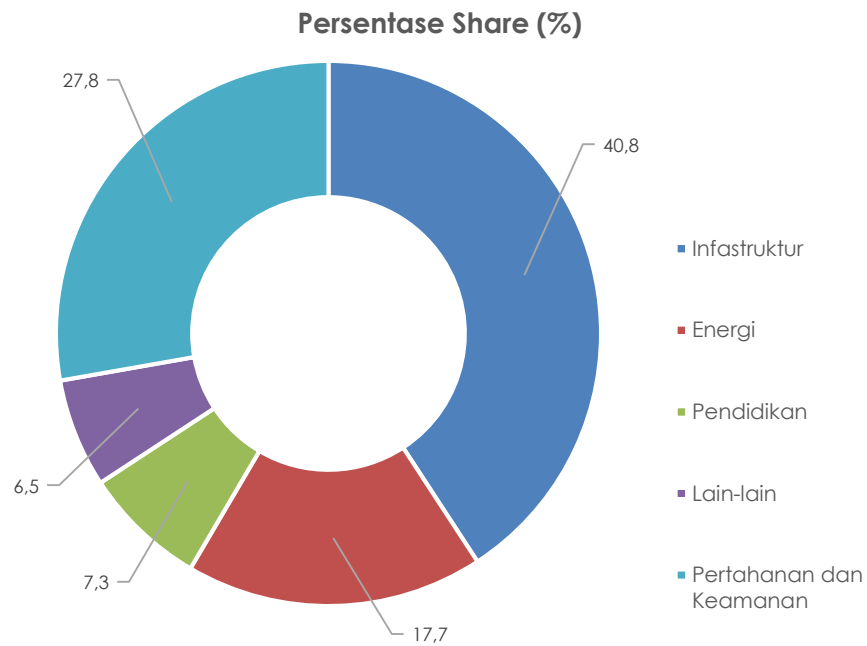
1. PROFIL PINJAMAN LUAR NEGERI TRIWULAN IV TAHUN 2017

Profil pinjaman luar negeri dapat dilihat berdasarkan pengelompokan dalam sektor pembangunan, berdasarkan instansi penanggung jawab, dan berdasarkan pemberi pinjaman (*lender*). Berdasarkan profil tersebut dapat diketahui komposisi pinjaman, nilai pinjaman, dan realisasi penyerapan pada Triwulan IV Tahun 2017, serta perubahannya dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dan triwulan yang sama pada tahun 2016.

❖ PROFIL PINJAMAN LUAR NEGERI BERDASARKAN ALOKASI SEKTORAL

Berdasarkan sektor pembangunan, pinjaman luar negeri dapat dikelompokkan kedalam 5 (lima) sektor utama, yaitu infrastruktur, energi, pendidikan, pertahanan dan keamanan, dan lain-lain. Sektor lain-lain mencakup kesehatan, peningkatan teknologi (IT), pemberdayaan masyarakat dan sebagainya. Komposisi dan alokasi nilai pinjaman luar negeri yang sedang berjalan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2017 berdasarkan sektor dapat dilihat pada gambar 2.1.

Gambar 2.1. Komposisi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Sektor



Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan III Tahun 2017 (diolah)

Porsi terbesar pinjaman luar negeri dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur dan energi, yaitu sekitar 58,5 persen. Hal tersebut sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam RPJMN 2015-2019 yang menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur, diantaranya untuk pengembangan sarana transportasi dan perkeretaapian dalam rangka mendukung konektivitas nasional, serta untuk mencapai target air bersih dan sanitasi. Sedangkan pinjaman luar negeri di sektor energi diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan listrik secara merata di seluruh wilayah di Indonesia dan mendukung pencapaian target listrik 35.000 MW di tahun 2019, yang meliputi pembangunan pembangkit listrik dan pembangunan jaringan transmisi. Sektor pertahanan dan keamanan menempati alokasi terbesar selanjutnya. Alokasi di sektor tersebut digunakan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan Alutsista TNI dan Almitsus Polri.

Bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (Triwulan IV Tahun 2016), terdapat penurunan komposisi pinjaman di sektor pertahanan dan keamanan, yaitu dari 28,9 persen menjadi 27,8 persen. Penurunan komposisi pinjaman juga terjadi di sektor energi, yaitu dari 23,2 persen turun menjadi 17,7 persen. Hal yang sama terjadi juga di sektor pendidikan, yaitu adanya penurunan komposisi pinjaman dari 7,8 persen menjadi 7,3 persen. Namun, terdapat juga peningkatan komposisi pinjaman, yaitu di sektor infrastruktur yang mengalami kenaikan signifikan dari 33,4 persen menjadi 40,8 persen. Sedangkan pada sektor lain-lain terjadi sedikit penurunan komposisi pinjaman, yaitu dari 6,5 persen menjadi 6,5 persen. Perubahan komposisi pinjaman tersebut disebabkan adanya proyek-proyek yang baru efektif dan adanya proyek-proyek yang sudah selesai (*closed*).

Tabel 2.1 Pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Sektor*(Ekuivalen Juta USD)*

Sektor	Jumlah Proyek	Nilai Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan IV TA 2017		Pinjaman Belum Ditarik	TA 2017		
			Nilai	%		Target	Realisasi	%
Infrastruktur	51	7.059,4	3.301,0	46,8	3.758,4	1.059,4	783,7	74,0
Energi	19	3.057,3	1.177,7	38,5	1.879,6	371,4	388,4	104,6
Pendidikan	14	1.266,4	583,9	46,1	682,5	244,4	135,9	55,6
Lain-lain	14	1.118,0	763,7	68,3	354,3	158,9	99,5	62,6
Pertahanan dan Keamanan	84	4.805,8	3.208,0	66,8	1.597,8	995,4	595,0	59,8
Total	182	17.307,0	9.034,3	52,2	8.272,7	2.829,5	2.002,5	70,8

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan IV Tahun 2017 (diolah)

Secara umum realisasi penyerapan pada triwulan ini menunjukkan penurunan dibanding periode yang sama pada tahun 2016, yaitu turun dari 77,3 persen menjadi 70,8 persen. Berdasarkan data di tabel 2.1, sektor energi memiliki kinerja penyerapan yang sangat tinggi, yaitu mampu menyerap 104,6 persen dari target penyerapan di tahun 2017, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2016 yang hanya mencapai 78,2 persen.

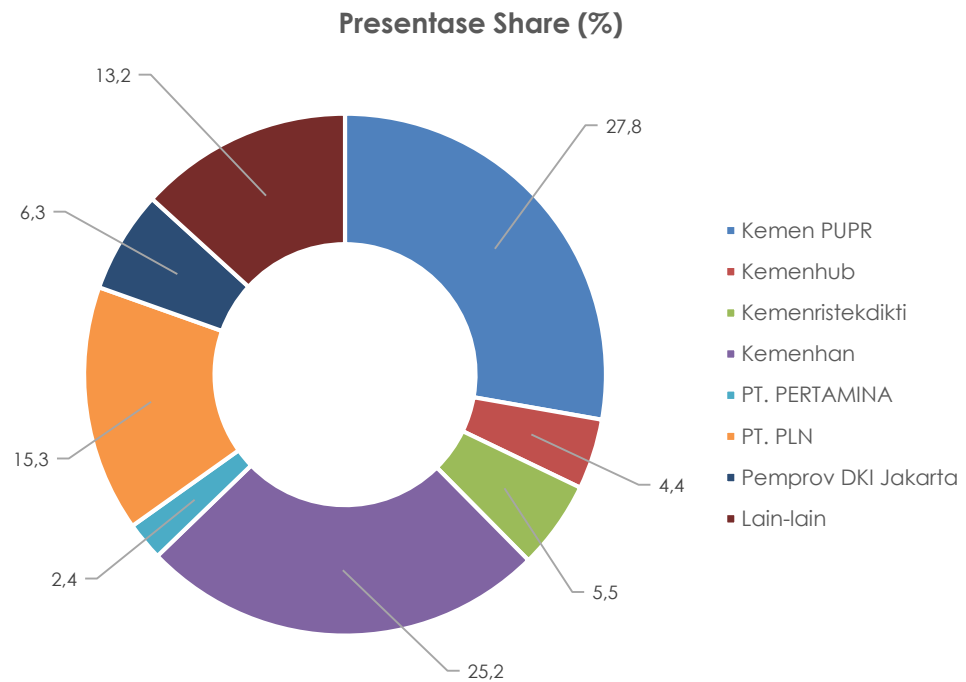
Disamping itu, kinerja di sektor infrastruktur juga mengalami sedikit peningkatan, yaitu dari 72,3 persen pada Triwulan IV Tahun 2016, menjadi 74,0 persen pada triwulan ini. Sebaliknya, kinerja penyerapan di sektor pertahanan dan keamanan mengalami penurunan yang sangat signifikan, yaitu dari 88,7 persen pada triwulan yang sama di tahun lalu menjadi hanya 59,8 persen pada triwulan ini. Demikian pula sektor lain-lain, mengalami penurunan kinerja penyerapan dari 69,3 persen pada Triwulan IV Tahun 2016 menjadi hanya 62,6 persen pada triwulan ini. Penurunan kinerja penyerapan juga terjadi pada sektor pendidikan dari 64,3 persen pada triwulan yang sama di tahun lalu menjadi hanya 55,6 persen pada triwulan ini.

❖ PROFIL PINJAMAN LUAR NEGERI BERDASARKAN INSTANSI PENANGGUNG JAWAB

Dalam gambar 2.2, dapat dilihat komposisi pinjaman luar negeri berdasarkan instansi penanggungjawab. Proporsi terbesar berada di Kemen PUPR, Kemenhan, dan PT PLN. Meskipun demikian, terdapat sedikit perubahan komposisi pinjaman selama triwulan ini, yaitu naiknya komposisi pinjaman pada Kemen PUPR dari 26,8 persen pada triwulan lalu menjadi 27,8 persen pada triwulan ini. Peningkatan komposisi pinjaman juga terjadi pada Kemenhub, yaitu dari 3,6 persen pada triwulan lalu menjadi 13,2 persen pada triwulan ini. Peningkatan komposisi pinjaman juga terjadi pada Pemprov DKI Jakarta.

Sedangkan komposisi pinjaman pada PT. PLN mengalami penurunan dari 20,0 persen menjadi 15,3 persen pada periode yang sama. Penurunan komposisi pinjaman juga terjadi pada Kemenhan dari 26,4 persen menjadi 25,2 persen, PT. Pertamina dari 3,2 persen menjadi 2,4 persen, instansi lain-lain dari 14,6 persen menjadi 4,4 persen.

Gambar 2.2 Komposisi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab



Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan IV Tahun 2017 (diolah)

Apabila dilihat dari nilai pinjaman, maka berdasarkan Tabel 2.2 terdapat kenaikan nilai pinjaman yang cukup signifikan dari Triwulan IV Tahun 2016 ke Triwulan IV Tahun 2017, yaitu sebesar USD 477,1 juta. Perubahan nilai pinjaman yang cukup signifikan terjadi pada Pemprov. DKI Jakarta yang naik sebesar USD 681,2 juta, disusul kemudian oleh Kemen PUPR yang juga mengalami kenaikan sebesar USD 296,8 juta, dan Kemenhub yang naik sebesar USD 156,7 juta.

Adapun PT. PLN mengalami penurunan nilai pinjaman yang sangat signifikan sebesar USD 723,9 juta, disusul oleh PT. Pertamina yang juga mengalami penurunan nilai pinjaman sebesar USD 117,3 juta, dan Kemenhan yang mengalami penurunan sebesar USD 78,2 juta.

Perubahan nilai pinjaman tersebut disebabkan adanya proyek-proyek yang telah selesai (*closing*) atau mengalami pembatalan sebagian (*partial cancellation*), dan adanya proyek-proyek yang baru efektif.

Tabel 2.2 Pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab

(Ekuivalen Juta USD)

Instansi Penanggung Jawab	Jumlah Proyek	Nilai Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan IV TA 2017		Pinjaman Belum Ditarik	TA 2017		
			Nilai	%		Target	Realisasi	%
Kementerian/ Lembaga	157	12.750,3	7.153,8	56,1	5.596,5	2.235,0	1.394,1	62,4
BIG	1	56,6	55,5	98,1	1,1	0,0	0,0	0,0
BPKP	1	57,8	46,0	79,7	11,8	18,8	10,9	58,0
BP Batam	1	50,1	11,5	22,9	38,6	22,5	8,6	38,2
BPS	1	47,0	12,2	25,9	34,8	7,7	8,5	110,1
Kemenag	1	123,8	1,4	1,1	122,4	14,8	1,3	8,8
Kemendes PDDT	2	518,5	360,8	69,6	157,7	23,4	14,4	61,4
Kemen KP	3	156,9	81,9	52,2	75,0	27,2	5,8	21,4
Kemennaker	1	32,5	27,2	83,7	5,3	24,1	24,0	99,5
Kemenkominfo	1	53,3	53,3	100,0	0,0	4,0	4,0	100,0
Kemen PUPR	40	4.805,1	2.409,8	50,2	2.395,3	665,2	504,8	75,9
Kemendikbud	1	21,1	20,8	98,4	0,3	1,4	1,4	100,0
Kemenhub	5	755,0	188,4	25,0	566,6	171,1	58,9	34,4
Kementan	2	129,1	99,2	76,8	29,9	26,9	19,7	73,1
Kemen PPN/Bappenas	2	175,4	136,8	78,0	38,6	28,5	26,1	91,6
Kemenristekdikti	10	946,1	424,9	44,9	521,2	199,8	107,1	53,6
Kepolisian RI	26	448,8	294,2	65,5	154,6	227,1	130,7	57,5
Kemenhan	58	4.357,0	2.913,8	66,9	1.443,2	768,3	464,3	60,4
LIPI	1	16,3	16,1	98,6	0,2	4,3	3,7	85,3
Diteruspinjamkan (SLA)	23	3.461,9	1.281,3	37,0	2.180,7	372,6	389,4	104,5
PT. PII	3	4,6	3,7	79,6	0,9	1,2	0,9	80,9
PT. PERTAMINA	2	414,3	186,7	45,1	227,6	34,6	29,5	85,3
PT. PLN	17	2.643,0	991,0	37,5	1.652,0	336,8	358,9	106,6
PT. SMI	1	400,0	99,9	25,0	300,1	0,0	0,0	0,0
Diterushibahkan	2	1.094,8	599,2	54,7	495,5	221,9	219,0	98,7
Pemprov DKI Jakarta	2	1.094,8	599,2	54,7	495,5	221,9	219,0	98,7
Total	182	17.307,0	9.034,3	52,2	8.272,7	2.829,5	2.002,5	70,8

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan IV Tahun 2017 (diolah)

Pelaksanaan pinjaman luar negeri berdasarkan instansi penanggung jawab dapat dikelompokkan menjadi kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga, diteruspinjamkan (*Subsidiary Loan Agreement* atau SLA), dan diterushibahkan. Dibandingkan dengan kinerja penyerapan tahun lalu (Triwulan IV Tahun 2016), beberapa instansi penanggung jawab proyek mengalami peningkatan kinerja penyerapan yang cukup signifikan pada triwulan ini, yaitu Kemennaker, Kemen Kominfo, Kemen PUPR, Kementan, Kemenhan, PT. PII, PT. Pertamina, PT PLN dan Pemprov DKI Jakarta. Beberapa instansi tersebut dikategorikan menjadi instansi yang memiliki kinerja penyerapan yang sangat baik karena telah melakukan penyerapan di atas 52,5 persen pada Triwulan IV Tahun 2017.

Selain terjadi peningkatan kinerja penyerapan pada beberapa instansi, pada triwulan ini juga masih terdapat cukup banyak instansi penanggungjawab yang belum melakukan penyerapan, sehingga tingkat penyerapannya masih sama atau bahkan belum melakukan penyerapan (nol). Khusus untuk BIG dengan proyek *National Geo-Spatial Data Infrastructure Development*, dan PT. SMI dengan proyek *Indonesia Infrastructure Finance Facility*, tidak adanya penyerapan yang dilakukan di triwulan ini karena proyek sebenarnya sudah selesai dan menunggu percepatan *closing date*.

❖ PROFIL PINJAMAN LUAR NEGERI BERDASARKAN SUMBER PINJAMAN

Pinjaman luar negeri yang sedang berjalan saat ini berasal dari 3 (tiga) kelompok sumber pinjaman, yaitu Kreditor Bilateral, Kreditor Multilateral, dan Kreditor Swasta Asing (KSA)/Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE).

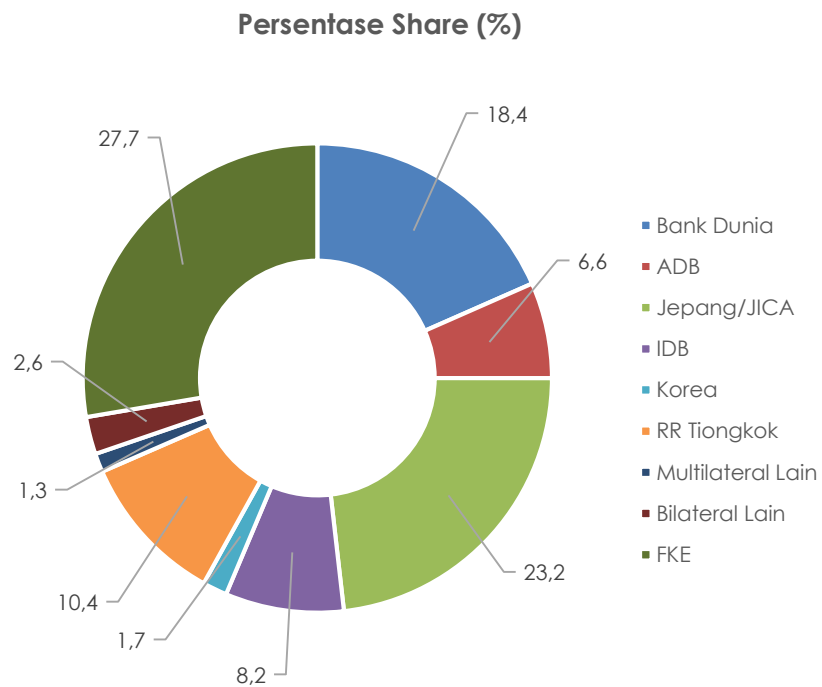
Kreditor Bilateral merupakan pemerintah negara asing atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah negara asing atau lembaga yang bertindak untuk pemerintah negara asing, seperti Jepang, Hongaria, Jerman, Korea, Perancis, RR Tiongkok, dan Spanyol.

Kreditor Multilateral merupakan lembaga keuangan internasional yang beranggotakan beberapa negara, seperti Bank Dunia, *Asian Development Bank* (ADB), *Islamic Development Bank* (IDB), *International Fund for Agricultural Development* (IFAD), dan *Saudi Fund*.

Kreditor Swasta Asing (KSA) diwakili oleh lembaga keuangan nasional dan lembaga non-keuangan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Indonesia, seperti PT. BNI cabang Singapura, Tokyo, dan Hongkong.

Adapun Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE) merupakan lembaga yang ditunjuk negara asing untuk memberikan jaminan, asuransi, pinjaman langsung, subsidi bunga, dan bantuan keuangan untuk meningkatkan ekspor negara yang bersangkutan serta melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Indonesia, seperti *BNP Paribas*, *Exim Bank of Korea*, *Export-Import Bank of China*, dan *Fortis Bank Belanda*.

Gambar 2.3 Komposisi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Sumber Pinjaman



Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan IV Tahun 2017 (diolah)

Keterangan: - Pinjaman Multilateral lain terdiri dari pinjaman yang bersumber dari pinjaman IFAD dan Saudi Fund

- Pinjaman Bilateral lain terdiri dari pinjaman yang bersumber dari pinjaman Hongaria, Jerman, Perancis, dan Spanyol

Sekitar hampir 70 persen dari pinjaman luar negeri yang sedang berjalan (*on going*) berasal dari LPKE, Jepang dan Bank Dunia. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 2.3, Sedangkan sisanya terbagi ke dalam beberapa Kreditor Bilateral dan Kreditor Multilateral. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Triwulan IV Tahun 2016), terdapat perubahan yaitu menurunnya komposisi pinjaman Bank Dunia dari 21,8 persen pada Triwulan IV Tahun 2016 menjadi 18,4 persen pada Triwulan IV Tahun 2017. Penurunan komposisi juga terjadi pada porsi pinjaman IDB yang turun dari 8,7 persen menjadi 8,2 persen, dan porsi pinjaman LPKE yang turun dari 28,9 persen menjadi 27,7 persen. Sebaliknya, pada rentang periode yang sama, terjadi kenaikan porsi pinjaman Jepang dari 22,9 persen menjadi 23,2 persen, pinjaman Korea dari 1,5 persen menjadi 1,7 persen, dan pinjaman ADB dari 5,6 persen menjadi 6,6 persen. Kenaikan porsi pinjaman juga terjadi untuk pinjaman RR Tiongkok dari 6,8 persen menjadi 10,4 persen. Untuk komposisi pada pemberi pinjaman lain tidak mengalami banyak perubahan.

Dibandingkan dengan Triwulan III Tahun 2017, pada triwulan ini nilai pinjaman mengalami perubahan yang cukup signifikan. Dilihat dari Tabel 2.3 secara total jumlah pinjaman senilai USD 17.307,0 juta mengalami peningkatan sebesar USD 477,1 juta dari triwulan sebelumnya. Peningkatan tersebut disebabkan adanya beberapa proyek yang baru efektif, sehingga beberapa pemberi pinjaman mengalami peningkatan nilai pinjaman. Bank Dunia mengalami peningkatan nilai pinjaman yang paling signifikan, yaitu sebesar USD 425,0 juta.

Tabel 2.3 Pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Sumber Pinjaman

(Ekuivalen Juta USD)

No	Sumber Pinjaman	Jumlah Loan	Nilai Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan IV TA 2017	Pinjaman Belum Ditarik	TA 2017		
						Target	Realisasi	%
I	Kreditor Multilateral	63	5.965,8	2.742,3	3.223,5	771,9	554,1	71,8
	Bank Dunia	22	3.185,8	1.737,3	1.448,5	282,8	242,8	85,9
	ADB	13	1.143,1	365,1	778,0	203,9	116,9	57,3
	IDB	20	1.414,3	489,3	925,1	239,8	183,7	76,6
	IFAD	6	151,6	125,5	26,1	30,0	8,2	27,2
	Saudi Fund	2	71,0	25,2	45,8	15,5	2,5	58,4
II	Kreditor Bilateral	55	6.552,8	3.103,9	3.448,8	1.048,6	865,8	82,6
	Jepang	29	4.010,9	2.039,7	1.971,3	514,5	437,4	85,0
	Hongaria	1	36,4	7,7	28,7	8,5	7,7	85,9
	Jerman	2	104,4	23,1	81,4	15,2	1,4	9,4
	Korea	5	292,4	104,2	188,1	67,9	36,2	53,4
	Perancis+AFD	5	273,4	120,6	152,8	20,3	4,0	19,7
	RR Tiongkok	11	1.803,4	790,2	1.013,1	402,5	373,0	92,7
	Spanyol	2	31,8	18,4	13,4	19,8	6,0	30,3
III	KSA/LPKE	85	4.788,5	3.188,1	1.600,4	1.009,0	582,6	57,7
	TOTAL	203	17.307,0	9.034,3	8.272,7	2.829,5	2.002,5	70,8

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan IV Tahun 2017 (diolah)

Realisasi penyerapan pada Triwulan IV Tahun 2017 yang mencapai 70,8 persen tersebut sebagian besar disumbang oleh kinerja proyek LPKE/KSA sebesar 57,7 persen, Kreditor Bilateral sebesar 82,6 persen dan Kreditor Multilateral sebesar 71,8 persen. Pada triwulan ini, kinerja tertinggi untuk Kreditor Multilateral dicapai oleh proyek-proyek pinjaman Bank Dunia dan IDB, yang masing-masing mencapai 85,9 persen dan 76,6 persen. Sedangkan pada Kreditor Bilateral, kinerja tertinggi terjadi pada proyek-proyek pinjaman Hongaria dan RR Tiongkok, yaitu mencapai 85,9 persen dan 92,7 persen.

❖ REKAPITULASI PROYEK TUTUP DAN BARU DI TRIWULAN IV TAHUN 2017

Pada tabel 2.4 berikut ini dapat dilihat beberapa proyek yang baru efektif dan masuk kedalam pemantauan triwulanan. Sedangkan pada tabel 2.5 dapat dilihat beberapa proyek yang telah selesai (*closed*) dalam satu triwulan ini sehingga dikeluarkan dari pemantauan pada Triwulan IV Tahun 2017.

Tabel 2.4 Rekapitulasi Proyek Baru Efektif di Triwulan IV Tahun 2017

(Ekuivalen Juta USD)

No	Nama/Jumlah Proyek	Instansi Penanggung Jawab	Lender	Nilai Pinjaman
Pinjaman Proyek Luar Negeri yang Baru Efektif				
1	<i>Dam Operational Improvement and Safety Project (DOISP) PHASE II</i>	Kemen PUPR	Bank Dunia	125,0
2	<i>Additional Financing for Indonesia Infrastructure Finance Facility Project</i>	PT. SMI	Bank Dunia	200,0
3	<i>Regional Infrastructure Development Fund (RIDF)</i>	PT. SMI	Bank Dunia	100,0
TOTAL				425,0

Tabel 2.5 Rekapitulasi Proyek Tutup di Triwulan IV Tahun 2017

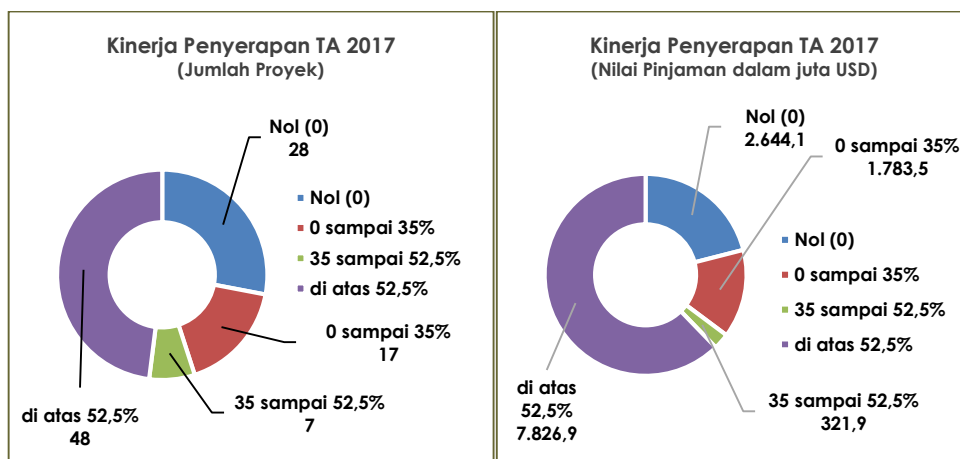
(Ekuivalen Juta USD)

No	Nama/Jumlah Proyek	Instansi Penanggung Jawab	Lender	Nilai Pinjaman
Pinjaman Proyek Luar Negeri yang Berakhir Masa Berlakunya				
1	<i>Coastal Community Development Project (CCDP)</i>	KKP	IFAD	34,0
2	<i>Coral Reef Rehabilitation and Management Program-Coral Triangle Initiative (Coremap-CTI)</i>	KKP	ADB	45,5
3	<i>Padang By-Pass Capacity Expansion Project</i>	Kemen. PUPR	Korea	62,9
4	<i>Tanjung Priok Access Road Construction Project I</i>	Kemen. PUPR	Jepang (JICA)	233,4
5	<i>Toll Road Development of Cileunyi-Sumedang-Dawuan (CISUMDAWU) Phase I</i>	Kemen. PUPR	RR Tiongkok	93,0
6	<i>PNPM ICDD Phase III</i>	Kemen. PUPR	IDB	20,0
7	<i>Participatory Irrigation System Improvement Project</i>	Kemen. PUPR	Jepang (JICA)	109,2
8	<i>Scholarships Program for Strengthening Reforming Institution (SPIRIT)</i>	BAPPENAS	Bank Dunia	112,7
TOTAL				710,7

2. RINGKASAN KINERJA DAN PERMASALAHAN PELAKSANAAN PROYEK PINJAMAN LUAR NEGERI TRIWULAN IV TAHUN 2017

Berdasarkan target penyerapan tahun 2017, maka realisasi anggaran sampai dengan triwulan ini mencapai 70,8 persen. Bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu, persentase realisasi penyerapan dalam triwulan ini mengalami penurunan sebesar 6,5 persen. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh adanya penurunan yang signifikan untuk realisasi penyerapan pada proyek-proyek LPKE/KSA. Penurunan realisasi penyerapan juga terjadi pada proyek-proyek Kreditor Multilateral, sedangkan realisasi penyerapan untuk proyek-proyek *soft loan* dari Kreditor Bilateral cenderung mengalami peningkatan. Meskipun demikian, capaian kinerja setiap proyek sangat beragam, dimana terdapat proyek yang memiliki kinerja penyerapan cukup baik, bahkan mencapai diatas 52,5 persen dari target penyerapan, sebaliknya terdapat pula beberapa proyek yang belum melakukan penyerapan atau bahkan tidak mengalami pergerakan sejak mulai efektif sampai dengan Triwulan IV Tahun 2017.

Gambar 2.4 Kinerja Penyerapan TA 2017 Berdasarkan Nilai Pinjaman dan Jumlah Proyek



Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan IV Tahun 2017 (diolah)

Secara umum terdapat sekitar 48 proyek yang memiliki kinerja penyerapan baik yang mampu menyerap di atas 52,5 persen dari target penyerapan tahun 2017. Dilihat dari sisi nilai pinjaman, 48 proyek tersebut bernilai USD 7.826,9 juta atau 45,2 persen dari total nilai pinjaman sebesar USD 17.307,0 juta. Sekitar 45 proyek mengalami kinerja yang sangat lambat dan hanya mampu menyerap di bawah 35 persen terhadap target tahun 2017. Diantara proyek-proyek tersebut, terdapat proyek yang mengalami penyerapan nol (0) atau bahkan belum menunjukkan adanya penyerapan sejak proyek dinyatakan efektif. Perhatian khusus perlu dilakukan pada proyek-proyek tersebut karena nilainya mencapai USD 4.427,6 juta atau 25,6 persen dari total nilai pinjaman. Untuk meningkatkan kinerja proyek-proyek yang tergolong rendah penyerapannya tersebut dapat dilakukan beberapa upaya, antara lain dengan melakukan pertemuan intensif untuk menyelesaikan permasalahan proyek, dan mempercepat proses reviu terhadap perubahan atau revisi rencana pelaksanaan proyek.

Beberapa permasalahan masih terjadi dalam pelaksanaan proyek dalam triwulan ini. Permasalahan pertama terkait dengan revisi desain (DED) proyek, yang dapat menyebabkan tertundanya pelaksanaan proyek karena adanya perubahan-perubahan pada ruang lingkup, nilai, dan lokasi proyek. Permasalahan kedua adalah lambatnya proses pengadaan barang/jasa yang antara lain disebabkan oleh lamanya reviu dokumen lelang, lamanya penerbitan NOL, dan tidak adanya penawaran yang masuk (gagal lelang). Selain itu, masih terdapat permasalahan terkait pengadaan lahan baik yang disebabkan karena proses perijinan, maupun terkait dengan isu permukiman kembali, dan kurangnya anggaran untuk pembayaran ganti rugi. Disamping permasalahan tersebut diatas, masalah administrasi seperti kekurangan alokasi DIPA, keterlambatan penerbitan *Withdrawal Application (WA)*, dan pengesahan (Surat Perintah Pengesahan Pembukuan/SP3) juga masih sering terjadi. Permasalahan lainnya yang saat ini mulai sering dilaporkan adalah rendahnya kinerja kontraktor yang berakibat pada keterlambatan penyelesaian proyek, disamping masalah terkait lainnya seperti kekurangan tenaga kerja, material dan peralatan berat, serta kendala cuaca ekstrem dan kondisi geologi *site project*.

3. LESSON LEARNED PELAKSANAAN PROYEK

Proyek-proyek yang dijadikan pembelajaran pada Triwulan IV Tahun 2017 meliputi satu proyek yang sudah selesai, yaitu *Coastal Community Development Project* yang dikelola oleh Kemen KP, dan satu proyek yang masih berjalan, yaitu *Sanimas Community-Based Sanitation Project in Indonesia* yang dikelola oleh Kemen PUPR.

Coastal Community Development Project

Proyek Pembangunan Masyarakat Pesisir atau *Coastal Community Development Project (CCDP)* merupakan kerjasama Ditjen Pengelolaan Ruang Laut Kemen KP dengan *International Fund for Agricultural Development (IFAD)* untuk pengentasan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan yang berkelanjutan (*pro-poor, pro-job, pro growth and pro sustainability*). CCDP dimaksudkan untuk mengurangi tingkat kemiskinan, dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir yang menjadi sasaran proyek. Pelaksanaan CCDP berdurasi selama lima tahun, dimulai dari 23 Oktober 2012 sampai dengan 31 Desember 2017, dengan alokasi dana mencapai total USD 43,2 juta, yang berasal dari pinjaman dan hibah IFAD, *Spanish Trust*, serta kontribusi Pemerintah Indonesia dan Kelompok Masyarakat.

Untuk mencapai maksud dan tujuan CCDP, maka komponen kegiatan proyek dirancang menjadi tiga komponen, yaitu a) komponen pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan pengelolaan sumber daya pesisir dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat; b) komponen pengembangan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan; dan c) komponen pengelolaan proyek.

Lokasi CCDP berada di tiga belas kabupaten/kota dalam sepuluh propinsi kawasan timur Indonesia, yaitu Kabupaten Merauke dan Kabupaten Yapen (Papua), Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Ambon (Maluku), Kota Ternate (Maluku Utara), Kota Bitung (Sulawesi Utara), Kabupaten Gorontalo Utara (Gorontalo), Kota Pare-pare dan Kota Makassar (Sulawesi Selatan), Kabupaten Lombok Barat (NTB), Kota Kupang (NTT), dan Kabupaten Kubu Raya (Kalimantan Barat), serta Badung (Bali) sebagai *Learning Center*. Sasaran CCDP meliputi 181 desa/kelurahan pesisir, setiap kabupaten/kota dikembangkan menjadi 15 desa/kelurahan pesisir, dan dari 15 desa/kelurahan tersebut dipilih 9 desa/kelurahan berdasarkan kriteria, antara lain a) tingkat kemiskinan tiap desa minimal 20%; b) memiliki motivasi dan partisipasi yang baik dalam menjalankan program-program sebelumnya; c) memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan, dan nilai tambah; d) memiliki pulau-pulau kecil di setiap lokasi, dimana warganya termasuk miskin, namun memiliki potensi sumber daya yang baik dan akses pasar. Total rumah tangga masyarakat pesisir yang menjadi sasaran proyek sebanyak 70.000 rumah tangga, baik terlibat langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan *Project Completion Report (PCR)* yang disusun pada akhir tahun 2017, diketahui bahwa hampir semua penerima manfaat dari proyek ini menyatakan kepuasannya. Sekitar 90% dana dari donor yang terserap telah mampu memenuhi tujuan, sasaran, hasil, dan keluaran (*outcome*) sesuai harapan. CCDP juga dianggap memiliki relevansi yang tinggi dengan kebijakan nasional terkait pengembangan perikanan, pengentasan kemiskinan, dan konservasi sumber daya alam. Selain itu, CCDP sejalan dengan Nawacita ketiga, yaitu membangun dari pinggiran, desa pesisir, dan pulau-pulau kecil di timur Indonesia yang terpencil. Keunggulan lainnya adalah CCDP terbukti efektif dan berkelanjutan. Hal ini dapat dilihat melalui kolaborasi kelompok usaha dengan para mitra. Strategi ini terbukti memuaskan karena produk dari kelompok usaha dapat menjangkau pasar yang lebih luas, dan menjadikan kelompok usaha dapat bertahan dan bahkan berkelanjutan dalam mengembangkan bisnisnya. Secara rinci kesimpulan hasil akhir dari pelaksanaan CCDP adalah sebagai berikut:

- 1) Tingkat kesejahteraan rumah tangga meningkat signifikan setelah adanya program CCDP (hasil perbandingan PCA RIMS 2013, 2015, dan 2017).
- 2) Pada aspek sosial ekonomi (literasi, sanitasi, dan sumber air bersih) secara keseluruhan indikator ini pada survei 2017 dibandingkan dengan survei 2013 dan 2015 ada sedikit perubahan namun tidak signifikan.
- 3) Terjadi peningkatan produktifitas di tahun 2017, khususnya pada budidaya tambak/kolam ikan, budidaya laut, olahan (ikan dan rumput laut) dan pemasaran dibandingkan dengan survei 2015.
- 4) Untuk aset usaha di berbagai jenis kegiatan perikanan dan kelautan mengalami kenaikan yang cukup signifikan terutama dalam kegiatan perikanan tangkap dan pengolahan ikan.

- 5) Adanya penurunan signifikan kelompok paling miskin (*poorest*) dari 27,1% diawal pelaksanaan proyek menjadi 18,9% diakhir pelaksanaan proyek. CCDP dalam dua tahun terakhir pelaksanaannya telah memberikan dampak positif pada tingkat pendapatan penerima manfaat (peningkatan kekayaan).
- 6) Terjadi penurunan jumlah balita < 5 tahun yang tergolong gizi buruk, baik pada kondisi kekurangan gizi akut, kondisi kekurangan gizi kronis dan kondisi kurus, dari 422 orang pada tahun 2013 menjadi 227 orang pada tahun 2017.
- 7) CCDP telah membantu masyarakat daerah pesisir untuk mengembangkan wilayah dan kesejahteraan keluarga.

Secara umum, ada berbagai pengalaman menarik dari CCDP yang bisa dijadikan pelajaran berharga. Pelajaran penting tersebut meliputi insentif keuangan, jadwal pelaksanaan, tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan pusat, kesejahteraan nelayan, kemitraan dengan pihak ketiga, dukungan SDM lokal, bantuan IFAD, serta komunikasi elektronik.

Insentif keuangan

CCDP menggunakan sistem *reward and punishment*. Dana dialokasikan setiap tahun berdasarkan kinerja PIU. Setelah di-*screening*, semua PIU ditempatkan di dalam 1 dari 3 *cluster* yang ada. *Cluster* pertama, untuk PIU yang memerlukan dana tambahan. *Cluster* kedua diperuntukkan bagi PIU yang mendapatkan peningkatan anggaran. *Cluster* ketiga untuk PIU dengan dukungan keuangan berkurang.

Sistem ini terbukti efektif karena penggunaan sistem keuangan berbasis insentif mampu memotivasi kinerja. Terbukti sejak 2016, semua PIU telah mencapai tingkat kinerja baik, yaitu berada di *Cluster* 1 atau *Cluster* 2.

Jadwal pelaksanaan

PMO memanfaatkan pendekatan jalur kritis. Setiap tahun dibuat rencana kerja untuk memastikan bahwa jadwal tersebut sesuai dengan kerangka waktu pelaksanaan di setiap kegiatan dan hubungannya dengan kegiatan lain.

Pengadaan barang/jasa harus mengikuti ketentuan IFAD dan Pemerintah Indonesia. Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa CCDP memilih beban administrasi dengan kecepatan pelaksanaan tercepat. Pengadaan barang/jasa kemudian di-upgrade dengan menambah staf, melatih sumber daya manusia, dan fasilitas. Sehingga mereka secara profesional mampu memroses sejumlah besar kontrak dalam waktu singkat. Pada tahun 2015 misalnya, berhasil diselesaikan sekitar 100 tender berstandar internasional. Inovasi ini mampu mempercepat laju pelaksanaan proyek lebih dari satu tahun.

Tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan pusat

Dilakukan melalui penyerahan dan promosi kerja tim antara pemerintah pusat dan daerah. Contoh menarik adalah dalam merekrut dan melakukan kontrak konsultan lokal di tingkat kabupaten/kota. PMO nasional memberikan acuan berupa TOR untuk posisi konsultan kepada PIU tingkat kabupaten. Berkonsultasi dengan PMO, PIU memodifikasi TOR dan draf kontrak. PIU mengelola seluruh proses tender untuk merekrut konsultan melalui negosiasi kontrak yang sudah dirancang. Draft kontrak tersebut kemudian dikirim kepada PMO. Selanjutnya, berkonsultasi dengan dengan PIU, PMO mengulas draft kontrak dan membuat modifikasi. Kontrak akhir kemudian dibuat langsung oleh konsultan pilihan PIU dan PMO. Konsultan terpilih akan bekerja setiap hari di PIU, namun dikontrol oleh PMO, sehingga konsultan wajib melaporkan pekerjaannya ke tingkat nasional dan lokal. Hasilnya, di semua tingkat pemerintahan saling memiliki tanggung jawab dan laporan secara profesional, sehingga dapat diselesaikan tepat waktu di seluruh proyek.

Kesejahteraan nelayan

Berbagai langkah sederhana telah dilakukan CCDP di tingkat produsen untuk meningkatkan pendapatan. Contohnya, pengeringan rumput laut, produksi ikan asap, pembuatan pakan ikan skala kecil, dan penyediaan kontak pendingin (*cold box*) untuk transportasi ikan segar.

Dalam banyak kasus, investasi yang relatif terbatas mampu meningkatkan keuntungan pendapatan sebesar 50%. Para perempuan desa yang sebelumnya tidak punya pendapatan, kini menjadi pedagang ikan dan pembudidaya ikan. Mereka memperoleh penghasilan tambahan sehingga kesejahteraan rumah tangga meningkat.

Kemitraan dengan pihak ketiga

CCDP telah mempertemukan akses pemerintah, sumber daya donor, dan masyarakat perikanan dengan pihak ketiga (sektor swasta, koperasi, BUMN, usaha kecil dan menengah) secara dinamis sehingga punya akses ke pasar dan lembaga keuangan. Kemitraan ini penting karena pelaku bisnis tidak memiliki pengetahuan dan kesabaran untuk bekerja sama dengan masyarakat lokal.

Dukungan SDM Lokal

Pemerintah daerah dan masyarakat lebih suka bekerja dengan individu dan perusahaan dari kabupaten mereka sendiri. Beruntung di Indonesia, keahlian SDM yang memadai tersedia di tingkat kabupaten, sehingga PMO mampu merekrut dan melakukan kontrak dengan SDM lokal dengan keahlian sangat baik.

Bantuan IFAD

IFAD terbukti menjadi mitra yang sangat berkualitas dan dapat diandalkan. IFAD telah memberikan dukungan teknis sesuai topik yang diminta. Bantuan ini meliputi beragam kegiatan seperti presentasi media, pelatihan dan pelaksanaan survei dasar, pengembangan strategi gender, prosedur pengadaan dan pengelolaan perikanan.

Para donor mampu mendukung CCDP bukan hanya dengan pelaksanaan misi besar tetapi juga dengan menyediakan individu seperti yang diminta oleh proyek untuk membantu lokakarya proyek, pelatihan, dan pertemuan. Tim IFAD juga mudah dihubungi di kantor Jakarta. Bahkan jika diperlukan, markas IFAD di Roma dapat dikontak melalui media elektronik kapan saja.

Komunikasi elektronik

181 desa pesisir jangkauan CCDP tersebar di daerah terpencil dengan panjang sejauh 1.500 km dan lebar 500 km. Kondisi geografis tersebut seringkali menyulitkan komunikasi melalui darat. Jalur kurir yang digunakan juga sangat lambat. Untungnya sebagian besar desa penerima CCDP dan semua PIU memiliki akses telepon seluler. Sehingga untuk input data, CCDP merancang primer M & E dan pelaporan protokol yang digunakan oleh *smartphone*. PIU juga memiliki akses internet sehingga informasi lengkap dan rinci disampaikan melalui email.

CCDP juga mengembangkan web yang komprehensif berbasis MIS, yang memungkinkan akses ke sebagian data proyek dan dokumen.

Aplikasi *mobile* seperti WhatsApp, Facebook, dan Twitter telah memberikan jalan untuk pertukaran informasi yang konstan tidak hanya antara PMO dan PIU, tetapi juga antara banyak kelompok pemangku kepentingan proyek. Semua staf proyek di berbagai kantor mudah dijangkau. Manfaat untuk membangun tim dan berbagi pengetahuan sudah sangat signifikan.

Penggunaan komunikasi elektronik, khususnya melalui *smartphone*, dianjurkan untuk manajemen proyek, membangun tim, dan kemajuan pelaksanaan monitoring.

Gambar 2.5. Dokumentasi Kegiatan CCDP di Kabupaten Yapen dan Kabupaten Lombok Barat



Sanimas Community-Based Sanitation Project in Indonesia

Dalam rangka mencapai salah satu target universal akses 100 – 0 –100 pada tahun 2019, yaitu 100% layanan terhadap akses air minum, 0% bebas kawasan kumuh dan 100% layanan terhadap akses sanitasi layak, Pemerintah Pusat bersama dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota melaksanakan kegiatan pembangunan sarana Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas).

Program Sanimas bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat demi mencapai kualitas kehidupan masyarakat, dengan sumber dana pinjaman *Islamic Development Bank* (IDB). Dalam penyelenggaraannya, kegiatan ini menekankan pada pelibatan masyarakat secara utuh sejak tahap perencanaan, pelaksanaan pembangunan sampai dengan pengelolaan sarana.

Program Sanimas dilaksanakan mulai 29 Oktober 2014 dan akan berakhir pada 29 Oktober 2019, dengan pelaksanaan secara bertahap di 1.800 lokasi sasaran di 13 propinsi dan 52 kabupaten/kota terpilih yang sebelumnya menjadi lokasi pelaksanaan program PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP). Lokasi sasaran kegiatan Sanimas adalah kelurahan yang terletak di daerah perkotaan dan semi perkotaan yang rawan sanitasi, serta mendukung program sanitasi di daerah perkotaan tersebut. Selain itu, kelurahan penerima program Sanimas sebelumnya telah menerima Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perkotaan. Hal ini merupakan perwujudan dari sinergi diantara program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Pada pelaksanaannya, program Sanimas akan menggunakan lembaga keswadayaan masyarakat (BKM/LKM) yang sudah ada. Total dana pinjaman IDB yang disalurkan untuk pelaksanaan Sanimas mencapai USD 100 juta.

Penerima manfaat program Sanimas adalah masyarakat yang tinggal di kawasan perkotaan dan semi perkotaan yang berpenduduk relatif padat, rawan sanitasi, dan diutamakan masyarakat berpenghasilan rendah. Prasarana sanitasi dipilih oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan setempat berdasarkan asas berkelanjutan. Selama perjalanannya sampai dengan tahun 2017, sarana sanitasi yang telah dibangun oleh Program Sanimas IDB sebanyak 943 unit, terdiri atas (a) Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal dengan sistem perpipaan sebanyak 877 unit, dan (b) Kombinasi MCK dengan IPAL komunal dengan sistem perpipaan sebanyak 66 unit. Total penerima manfaat program Sanimas IDB ini sebanyak 28.460 Sambungan Rumah (SR) yang melayani 36.367 KK (145.460 jiwa).

Program Sanimas IDB dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, melalui upaya peningkatan cakupan layanan sanitasi dengan pendekatan berbasis masyarakat. Dengan terbangunnya fasilitas sanitasi melalui program Sanimas ini mendatangkan nilai tambah yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, yaitu:

- 1) Lingkungan sekitar IPAL menjadi lebih bersih dan rapi, masyarakat pun lebih sehat. Dengan dibangunnya jaringan perpipaan air limbah rumah tangga yang disalurkan ke IPAL komunal menyebabkan saluran drainase lingkungan hanya terisi air hujan, sehingga dapat mengurangi kawasan kumuh dan meminimalisir timbulnya bau tidak sedap dan penyakit yang diakibatkan oleh nyamuk dan bakteri atau virus dari air kotor. Selain itu, kualitas air pada badan air atau sumber air (sumur gali dangkal) menjadi lebih baik karena tidak tercemari air limbah rumah tangga lagi.
- 2) Pembangunan Sanimas memiliki dampak positif bagi kehidupan ekonomi masyarakat pemanfaat antara lain:
 - a) Biaya pengobatan masyarakat menurun karena berkurangnya penularan penyakit melalui media air (*water borne diseases*) akibat dari kualitas drainase lingkungan dan kualitas sumber air yang lebih baik.
 - b) Biaya pembersihan lingkungan menurun karena drainase lingkungan yang sudah tidak terisi air limbah rumah tangga lagi, tapi hanya terisi air hujan.
 - c) Masyarakat tidak perlu membangun tangki septik individu dan tidak perlu mengeluarkan biaya pengurasannya, namun hanya membayar iuran untuk operasional dan pemeliharaan (O & P) IPAL komunal yang besarnya antara Rp 5.000,- - Rp 10.000,- per KK (tergantung kesepakatan warga).
 - d) Sanimas juga mendorong *income generating* (penghasilan tambahan) bagi warga jika dikembangkan kegiatan lain pasca konstruksi, khususnya pemanfaatan air limbah yang telah diproses melalui IPAL (*effluen*), seperti budidaya ikan lele, ikan nila, serta tanaman produktif (sawi, kangkung, cabe, strawberry dll).

- 3) Pembangunan Sanimas juga memberi dampak sosial masyarakat yang positif, misalnya perubahan fungsi lahan yang awalnya tidak produktif (tempat pembuangan sampah dll) menjadi bangunan IPAL yang dihias cantik dan diatas bangunannya dapat dimanfaatkan kegiatan warga, seperti tempat perkumpulan warga, edukasi, lapangan olahraga, pengembangan kreatifitas, dan hal lain yang bermanfaat.

Secara umum capaian Program Sanimas-IDB menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Berdasarkan laporan akhir tahun 2017, tercatat 863 lokasi dari target 1.800 lokasi yang sudah menyelesaikan pembangunan sarana sanitasi komunal. Meskipun demikian dari sisi penyerapan dana, pelaksanaan Program Sanimas-IDB tergolong *behind schedule*, karena penyerapan kumulatif selama tiga tahun hanya mncapai 32,59% atau sebesar USD 32,59 juta dari total dana sebesar USD 100 juta.

Beberapa pembelajaran yang diperoleh dari pelaksanaan Program Sanimas-IDB antara lain, yaitu:

- 1) Partisipasi dan komitmen masyarakat

Sanimas didisain untuk memberdayakan masyarakat miskin perkotaan sehingga mereka dapat memilih sendiri program sanitasinya, menyusun rencana aksi, membentuk kelompok, mengelola pembangunan fisik, serta mengelola operasi dan pemeliharannya. Sanimas bersifat tanggap kebutuhan dengan masyarakat yang layak mengikuti Sanimas akan bersaing untuk mendapatkan dukungan program dengan menunjukkan komitmen serta kesiapan untuk melaksanakan sistem sesuai pilihan mereka sendiri. Untuk itu, partisipasi dan komitmen masyarakat merupakan hal kunci dalam mewujudkan Sanimas.

Partisipasi merupakan prakondisi untuk keberhasilan Sanimas, bahwa mayoritas masyarakat terlibat secara aktif dan bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaannya. Metode partisipatif dalam Sanimas ternyata juga mampu mendorong partisipasi perempuan dan masyarakat yang kurang beruntung.

Adapun komitmen masyarakat dalam pelaksanaan Sanimas ditunjukkan dengan banyaknya hibah dari masyarakat berupa lahan untuk pembangunan IPAL komunal.

- 2) Kontribusi dan Komitmen Pemerintah Daerah

Untuk mewujudkan keberhasilan program Sanimas dibutuhkan juga adanya kontribusi dan komitmen Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi inisiatif kelompok masyarakat. Dukungan dan fasilitasi Pemerintah Daerah perlu dilakukan sejak perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan.

Fasilitasi Pemerintah Daerah bisa berbentuk pendampingan selama proses perencanaan dan pelaksanaan, kontribusi pendanaan untuk mendukung pengembangan sarana sanitasi yang dibangun masyarakat, dan dukungan berupa kehadiran para Kepala Daerah dalam setiap peresmian sarana sanitasi yang dibangun masyarakat.

- 3) Lingkungan menjadi lebih bersih dan indah

Pembangunan sarana sanitasi seperti IPAL komunal telah menumbuhkan inovasi masyarakat yang mengembangkannya menjadi taman bermain, tempat pertemuan, taman bacaan, posyandu, dan apotik hidup. Sehingga terdapat nilai tambah dari sekedar sarana sanitasi komunal.

Gambar 2.6. Dokumentasi Kegiatan Sanimas-IDB Berupa IPAL Komunal di Sumatera dan Jawa



HIBAH LUAR NEGERI

PELAKSANAAN HIBAH LUAR NEGERI

Dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah dinyatakan bahwa hibah adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri.

Pemantauan terhadap pelaksanaan hibah luar negeri bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan, mencari solusi dan menindaklanjuti permasalahan tersebut. Hasil pemantauan selain digunakan untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan dan penyesuaian terhadap perencanaan, juga digunakan sebagai pembelajaran dalam pengambilan kebijakan maupun replikasi, serta *scaling up* kegiatan di masa mendatang.

Hibah luar negeri yang dipantau dan dilaporkan pelaksanaannya pada Triwulan IV Tahun 2017 berjumlah 4 (empat) proyek hibah terencana yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan 1 (satu) hibah terencana yang dilaksanakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

Biodiversity Conservation and Climate Protection In The Gunung Leuser Ecosystem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kegiatan hibah yang dikelola oleh Direktorat Kawasan Konservasi Ditjen KSDAE KLHK, yang dibiayai oleh *Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)* senilai € 8.460.000 ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan ekosistem Leuser berkelanjutan dalam rangka menurunkan deforestasi dan merestorasi hutan yang terdegradasi, sehingga berkontribusi pada konservasi di kawasan yang memiliki salah satu cadangan karbon terbesar di Asia. Kegiatan hibah ini dimulai sejak 28 November 2016, dan akan berakhir pada 31 Desember 2019.

Implementing agency dari kegiatan hibah ini adalah Dinas LHK Provinsi Aceh, dengan lokasi kegiatan berada di bagian terbesar dari ekosistem Gunung Leuser, yaitu Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, dan kota Subulussalam.

Pelaksanaan kegiatan hibah diharapkan dapat memberikan beberapa output sebagai berikut:

- a) Output pertama yang dilaksanakan oleh Dinas LHK Provinsi Aceh, yaitu mendukung pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat di 3 (tiga) kabupaten dalam kegiatan pembangunan yang berorientasi konservasi dan penyelesaian konflik dengan ekosistem Gunung Leuser (minimum 40 desa) melalui kegiatan:
 - Perencanaan penggunaan lahan dan tata batas area konservasi.
 - Penerapan pendekatan pembangunan yang berorientasi konservasi termasuk Hutan Rakyat dan *agroforestry*.
 - Pembangunan Pusat GIS untuk mendukung MRV dan perencanaan penggunaan lahan.
- b) Output kedua yang dilaksanakan oleh UPT BKSDA Aceh dan BBTN Gunung Leuser adalah meningkatkan kapasitas instansi terkait dalam hal konservasi melalui kegiatan:
 - Pembentukan tambahan Unit Pengendali Konflik CRU dan dukungan terhadap CRU yang ada.
 - Pengelolaan SM Rawa Singkil.
 - Pembangunan stasiun rehabilitasi orang utan dan penelitian orang utan di TN Gunung Leuser.
 - Dukungan terhadap TN Gunung Leuser infrastruktur dan pengembangan koridor Trumon.
 - Penetapan kajian penyelesaian konflik harimau.

Secara umum perkembangan pelaksanaan hibah cukup baik, beberapa capaian dari masing-masing output antara lain: 1) reboisasi hutan rakyat dan *agroforestry*, 2) penetapan batas TNGL dan batas desa, 3) kesepakatan konservasi desa, 4) mitigasi konflik satwa, 5) sosialisasi patroli, 6) pendidikan konservasi, *smart* patrol, dan konservasi penyus/orang utan. Beberapa kegiatan juga telah direncanakan untuk tahun 2018, yaitu:

Dinas LHK Provinsi Aceh:

- 1) Melaksanakan *Partisipatif Rural Appraisal (PRA)*, *Partisipatory Land Use Planning (PLUP)* dan Rencana Pembangunan Desa (RPD) di minimal 14-20 desa.

- 2) Melaksanakan patroli desa di minimal 40 desa.
- 3) Melaksanakan operasi 24 Kebun Bibit Rakyat (KBR) dengan kapasitas 950.000 bibit.
- 4) Melaksanakan penanaman minimal 700 Ha dengan model reboisasi dan pengayaan (ekorestorasi).
- 5) Melaksanakan Hutan Desa Lisensi minimal 3.000 Ha.
- 6) Melaksanakan Kesepakatan Konservasi di minimal 14 desa, dan PES di minimal 40 desa.
- 7) Latihan dan studi untuk staf dan masyarakat.
- 8) Membina tiga produk non kayu (rotan/kerajinan, madu, gula aren/nipah).
- 9) Kelembagaan di 26 desa.
- 10) Batas rekonstruksi 66 km, dan bisa ditambah.

BKSDA Aceh:

- 1) Dukungan untuk penguatan manajemen SM Rawa Singkil.
- 2) Dukungan untuk rehabilitasi stasiun Orang Utan di SM Rawa Singkil dan mengembangkan pendekatan ekowisata untuk stasiun di Lai Trup.
- 3) Dukungan untuk tindakan resolusi konflik satwa liar (gajah, orang utan, dan beruang).
- 4) *Smart Patrol*, Patroli Gabungan dan Patroli Rutin.
- 5) Pendidikan konservasi bagi masyarakat.
- 6) *Study Tour*.

BB TN Gunung Leuser:

- 1) Dukungan untuk pengelolaan Rawa Kluet.
- 2) Rehabilitasi stasiun riset orang utan di Suaq Belimbing.
- 3) Pelaksanaan penelitian harimau untuk menyelesaikan konflik satwa liar dengan harimau.
- 4) Rehabilitasi stasiun penyu di Rantau Sialang.
- 5) *Smart Patrol*, Patroli Gabungan dan Patroli Rutin.
- 6) Pendidikan konservasi bagi masyarakat.
- 7) *Study Tour*.

Beberapa tantangan atau permasalahan yang potensial dapat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan kegiatan hibah adalah revisi AWP 2017 dan DIPA 2017 untuk mengalihkan alokasi dana pengadaan barang dan jasa tahun 2017 ke 2018 memerlukan waktu yang lama karena memerlukan *No Objection Letter* (NOL) dari KfW.

Gambar 3.1 Dokumentasi Kegiatan Hibah Biodiversity Conservation and Climate Protection In The Gunung Leuser Ecosystem



Hibah Forest and Climate Change Program (Forclime), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Forest and Climate Programme (Forclime) merupakan kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jerman untuk mendemonstrasikan kegiatan-kegiatan dalam rangka implementasi REDD+ pada tingkat proyek yang nantinya mendukung kebijakan terhadap kerangka kerja REDD+ di tingkat subnasional maupun nasional. Kegiatan hibah ini terdiri dari dua modul, yaitu *Forclime Financial Cooperation* atau *Forest Programme I*, dan *Forclime Technical Cooperation*.

Forclime Financial Cooperation (Forest Programme I) merupakan hibah terencana senilai EUR 22 juta (termasuk 10 persen kontribusi dari Pemerintah Indonesia) yang dilaksanakan oleh Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal KLHK dengan lokasi di Jakarta, Kapuas Hulu (Kalimantan Timur), Berau (Kalimantan Barat), dan Malinau (Kalimantan Tenggara). Tujuan dan capaian *Forclime Financial Cooperation* adalah sebagai berikut:

- Penurunan emisi karbon sebesar 300.000 – 400.000 Ton CO₂ eq per lokasi *Demonstration Activities*.
- Memperkuat pengelolaan hutan secara lestari, yaitu pengelolaan hutan berbasis masyarakat melalui perhutanan sosial yang meliputi hutan desa 8 unit, hutan adat dan hutan kemasyarakatan, serta dukungan terhadap PHPL melalui RIL dan HCVF.
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan melalui pengembangan fasilitator di tiga kabupaten (67 desa) sebanyak 310 orang, dan penyaluran dana ke masyarakat.

Forclime Technical Cooperation merupakan hibah langsung berupa bantuan teknis dari *German Ministry for Economic Cooperation and Development* senilai lebih dari EUR 35 juta sejak tahun 2009, dan baru akan berakhir pada tahun 2020. Hibah ini dilaksanakan oleh Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal KLHK dengan lokasi di Jakarta, Kapuas Hulu (Kalimantan Timur), Berau (Kalimantan Barat), Malinau (Kalimantan Tenggara), dan Sigi (Sulawesi Tenggara). Tujuan dari *Forclime Financial Cooperation* adalah menurunkan emisi Gas Rumah Kaca dari sektor kehutanan, mengkonservasi keanekaragaman hayati, dan menerapkan pengelolaan hutan secara lestari untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan tersebut dilaksanakan melalui tiga area strategis, yaitu kerangka kebijakan nasional dan daerah, pembangunan KPH, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Kegiatan utama *Forclime* meliputi beberapa kegiatan, yaitu (a) *Participatory Land Use Planning (PLUP)*, (b) Persemaian masyarakat, (c) *Agroforestry*/penanaman, (d) Pemeliharaan, (e) Perlindungan hutan/patroli hutan, (f) Pengembangan HHBK, (g) Perhutanan sosial, dan (h) Dukungan sertifikasi FSC. Adapun capaian dari kegiatan utama tersebut adalah:

- Emisi dikurangi di 5 DA sampai 2016: 1.028.919,86 tCO₂e atau 205.783.972 tCO₂e/DA.
- Luas area *agroforestry*: 4.989 Ha.
- Luas area patroli 2017: 168.462,67 Ha.
- Hutan Desa (2 di Berau, 3 di Kapuas Hulu).
- Agroforestry*: 4.587 KK.
- Patroli Hutan Berbasis Masyarakat: 170 Tim.
- Demplot hortikultura dan *silvofishery* melibatkan 68 desa (± 10 desa di Mangrove).
- Untuk pengelolaan hutan lestari sudah dilakukan *reduce impact logging*, HCVF, dan dukungan sertifikasi FSC.

Gambar 3.2 Dokumentasi Kegiatan Hibah Forest Programme



Beberapa permasalahan yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan kegiatan hibah ini dalam tahun 2017 adalah:

- 1) Terbitnya UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengakibatkan keterlambatan implementasi DIPA pada tahun 2017. Sehingga likuiditasi DIPA kabupaten dan transfer aset memakan waktu lama. Transfer DIPA dari kabupaten ke Biro Perencanaan juga memerlukan penyesuaian dan pengaturan administratif.

- 2) *Replenishment* KfW membutuhkan waktu yang lama (\pm 2 bulan), sehingga terjadi keterlambatan pencairan dana investasi dan kegiatan di lapangan, dan saldo Rekening Khusus di bawah batas yang ditentukan.
- 3) Penyesuaian antara ketersediaan anggaran dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Beberapa tantangan juga diperkirakan akan dihadapi oleh kegiatan hibah ini selanjutnya, antara lain:

- 1) Pengelolaan pasca panen produk HHK, HHBK, dan Jaslink antara lain pengemasan dan pemasaran.
- 2) Menjaga komitmen para pihak dalam mengembangkan hasil program kerjasama melalui Forclime.
- 3) Penguatan kelembagaan lokal, tata kelola administrasi desa, dan meningkatkan investasi produktif.
- 4) Ketahanan pangan melalui investasi berbasis penanaman, demplot pertanian dan perikanan.
- 5) Implementasi pengelolaan Hutan Desa untuk meningkatkan profil ekonomi desa.

Adapun *exit strategy* dari kegiatan ini juga sudah dipersiapkan, yaitu bagaimana mengelola keberlanjutan hasil program Forclime untuk menciptakan dampak kemanfaatan, antara lain:

- 1) Peningkatan kapasitas masyarakat mitra melalui kegiatan diklat, *share learning*, dan sekolah lapang.
- 2) Meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap program Forclime.
- 3) Mendorong dukungan para pihak di daerah untuk berkontribusi dalam mengelola sumber daya.
- 4) Mengadopsi model-model kelola usaha kehutanan dan sumber daya alam dalam skema perhutanan sosial.
- 5) Mendorong adanya kelembagaan usaha kelola HHK, HHBK dan Jaslink dengan skema PS.

Hibah Forest Program II : Development of Biodiversity Conservation and Integrated Watershed Management, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kegiatan hibah ini merupakan bantuan Pemerintah Jerman melalui KfW. *Financing agreement* ditandatangani sejak 16 Juli 2014 senilai € 23 juta, dan kegiatan hibah akan dilaksanakan selama 7 (tujuh) tahun dengan *Program Executing Agency* adalah Direktorat Konservasi Tanah dan Air, Ditjen PDASHL Kemen LHK. Ruang lingkup kegiatan hibah meliputi konservasi keanekaragaman hayati dan pengembangan pengelolaan DAS terpadu di 2 (dua) lokasi, yaitu:

- 1) Lokasi 1 adalah daerah penyangga TN Kerinci Seblat senilai € 18 juta, meliputi:
 - Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, dan Kabupaten Sarolangun.
 - Sub DAS Merangin dan Tembesi.
- 2) Lokasi 2 adalah daerah penyangga TN Bukit Tiga Puluh senilai € 5 juta, meliputi:
 - Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tebo.
 - Sub DAS Pengabuan dan Sumai.

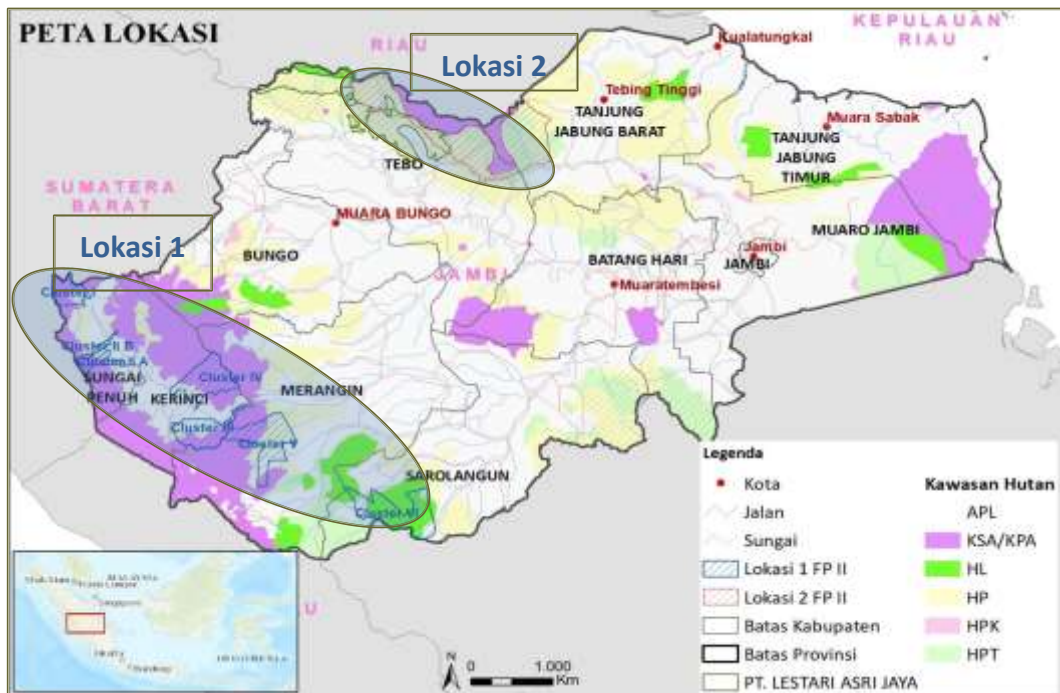
Kegiatan hibah ini bertujuan untuk mendukung Indonesia dalam pengembangan strategi dan implementasi langkah-langkah mengenai konservasi keanekaragaman hayati, dan daerah aliran sungai dalam kerangka strategi REDD+ nasional di Jambi Barat dan Kalimantan. Adapun indikator-indikator dari kegiatan hibah ini adalah:

- 1) Penutupan hutan di wilayah proyek adalah stabil di TNKS dan di daerah perbatasan, dan meningkat setidaknya 6.000 Ha di area inti untuk rehabilitasi daerah aliran sungai.
- 2) Persentase konflik manusia-satwa (gajah, harimau) yang berhasil diselesaikan atau dikurangi meningkat secara signifikan di area proyek utama.
- 3) Populasi spesies prioritas utama yang terancam punah, khususnya Harimau Sumatera akan meningkat paling sedikit 2% dari jumlah populasi absolut.
- 4) *Monetarized* modal saham masyarakat yang berpartisipasi dalam proyek meningkat melalui penggunaan hutan secara legal dan *agroforestry*, dan 90% investasi mata pencaharian harus mencapai ekspektasi ekonomi dari rencana bisnis.
- 5) Kuantitas dan kualitas air di lanskap terpilih ditingkatkan.
- 6) 1-2 inovasi yang dipromosikan oleh proyek akan diintegrasikan ke dalam perangkat strategi pengelolaan pemerintah.

Adapun permasalahan yang masih mempengaruhi kelancaran pelaksanaan kegiatan hibah ini adalah:

- 1) Adanya pengurangan luas target RHL dari yang direncanakan karena terkait dengan ketersediaan lahan yang *clear and clean* di lapangan.
- 2) Keberadaan kantor BPSKL Wilayah Sumatera di Medan menyebabkan kurang optimalnya koordinasi dan implementasi kegiatan di lapangan.
- 3) Realisasi anggaran kurang optimal karena:
 - a) Keterbatasan waktu pelaksanaan (DIPA HLN FP II baru disahkan tanggal 10 Agustus 2017).
 - b) Terdapat Pembayaran Langsung oleh KfW kepada pihak ketiga yang tidak bisa dibukukan dalam tahun 2017.
 - c) Belum ada perpanjangan perijinan lembaga Flora dan Fauna Indonesia (FFI), sehingga kegiatan perlindungan dan konservasi harimau dengan *service provider* FFI belum dilaksanakan dalam tahun 2017.
 - d) Terdapat kegiatan pengadaan peralatan lapangan yang tidak terlaksana.

Gambar 3.3 Peta Lokasi Kegiatan Hibah Forest Program II



Hibah Forest Program III : Sulawesi Collaborative Integrated Management of The Lore Lindu Landscape, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kegiatan hibah *Forest Program III* ini dibiayai oleh KfW dengan total dana sebesar EUR 13.500.000, dan akan dilaksanakan selama 7 (tujuh) tahun dari 2017 sampai dengan 2023. Tujuan pelaksanaan kegiatan hibah ini adalah implementasi pengelolaan bersama dan terpadu *landsekap* Lore Lindu, serta mendukung pengembangan dan implementasi upaya konservasi keanekaragaman hayati dan Daerah Aliran Sungai (DAS) dalam kerangka Strategi Nasional REDD+ di Sulawesi Tengah. Adapun kegiatan pokok dari hibah ini adalah pengelolaan kerjasama yang terpadu terhadap Bentang Alam Lore Lindu.

Executing agency dari kegiatan hibah adalah Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam, Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, dengan *implementing agency* yaitu:

- 1) Balai Besar TN Lore Lindu, Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem.
- 2) Balai Pengelolaan DASHL Palu-Poso, Ditjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung.
- 3) Balai PSKL wilayah Sulawesi, Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.

Beberapa hal yang melatarbelakangi pelaksanaan kegiatan hibah *Sulawesi Collaborative Integrated Management of The Lore Lindu Landscape*, yaitu: a) perlunya dukungan terhadap upaya perlindungan terhadap keanekaragaman hayati di Indonesia, b) perlunya program integrasi pengelolaan DAS sebagai upaya alokasi pemanfaatan lahan, perencanaan tata ruang, dan

perlindungan hutan dalam satu *landscape* ekologi, 3) Sulawesi Tengah memiliki *species endemic* dan keanekaragaman hayati yang tinggi, 4) TN Lore Lindu merupakan zona inti dari Cagar Biosfer Lore Lindu.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka output yang diharapkan dari pelaksanaan hibah ini adalah:

- 1) Terjaganya keutuhan TN Lore Lindu dengan cara a) menjalin hubungan baik antara TN Lore Lindu dengan pemerintah daerah, dan masyarakat lokal, b) mendukung upaya restorasi kawasan yang terdegradasi, c) memecahkan permasalahan perambahan secara partisipatif, d) penegakan hukum sebaik mungkin, e) monitoring keanekaragaman hayati.
- 2) Rehabilitasi hutan yang terdegradasi di Sub DAS Miu, Gumbasa, Wuno, Bambamua, dan Huku Lariang dengan cara a) meningkatkan target, aplikasi teknis, dan monitoring program yang dilaksanakan oleh BPDASHL Palu Poso, b) mendorong pembangunan hutan alam campuran yang sejalan dengan sasaran dan target Cagar Biosfer Lore Lindu dan TN Lore Lindu.
- 3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar Kawasan TN Lore Lindu dan Cagar Biosfer Lore Lindu.
- 4) Meningkatkan kerjasama dengan pihak terkait.

Kegiatan hibah yang sudah berjalan selama satu tahun ini cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa kendala yang menghambat kelancaran pelaksanaan kegiatan, antara lain a) kegiatan dalam DIPA awal kurang sesuai dengan *Annual Work Plan* (AWP), sehingga diperlukan adanya revisi AWP maupun DIPA, dan b) proses *replenishment* membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga pencairan terhambat. Adapun kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dalam tahun 2017 meliputi:

- 1) Patroli bersama masyarakat.
- 2) Penyusunan rencana pemulihan ekosistem.
- 3) Penelitian oleh Universitas Tadulako-IPB.
- 4) Persiapan Kemitraan Konservasi Masyarakat.
- 5) Rehabilitasi Hutan Lindung seluas 300 Ha.
- 6) Pembangunan konservasi tanah dan air (DAM penahan 20 Unit).
- 7) Penyusunan *baseline project*: pengelolaan DAS, sosial ekonomi.
- 8) Pengadaan peralatan dan bangunan SPAS (Stasiun Pengamat Arus Sungai) 2 unit.
- 9) Pembekalan fasilitator.

Hibah *Millenium Challenge Corporation* (MCC) *Compact*, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

Hibah *Millenium Challenge Corporation* (MCC) yang disebut hibah *compact* adalah salah satu pilar utama kemitraan komprehensif Amerika Serikat-Indonesia. Program *compact* ini bertujuan membantu mengurangi kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan diselenggarakan selama 5 tahun, yaitu dari 2 April 2013 sampai dengan 1 April 2018 dengan nilai hibah sebesar USD 600 juta. Instansi pelaksana hibah ini meliputi Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta LKPP.

Berbeda dengan pemberi hibah pada umumnya, MCC memberikan keleluasan dan wewenang bagi Indonesia untuk mengembangkan program yang digagas dengan melibatkan banyak pemangku kepentingan. Pelibatan banyak pemangku kepentingan ini, baik dari Kementerian/Lembaga, akademisi, dunia usaha hingga organisasi masyarakat madani (*Civil Society Organization/CSO*) merupakan hal baru dan belum pernah terjadi sebelumnya dalam perancangan program hibah dari mitra asing. Dengan demikian, program hibah bersaing dari MCC ini sejalan dengan prinsip *Jakarta Commitment*, yaitu Indonesia dan para mitra pembangunan bersama-sama memperkuat kepemilikan (*ownership*) negara penerima bantuan pembangunan.

Program *compact* bertujuan mendukung upaya pengentasan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi. Tujuan tersebut akan dicapai melalui implementasi tiga proyek yang menjadi fokus utama program, yaitu:

- 1) Proyek Kemakmuran Hijau:
 - a) Meningkatkan produktifitas dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dengan memperluas penggunaan energi terbarukan.
 - b) Mengurangi emisi gas rumah kaca berbasis pengelolaan lahan dengan memperbaiki praktik penggunaan lahan dan pengelolaan sumber daya alam.

- 2) Proyek Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat untuk Mengurangi *Stunting* (PKGBM):
 - a) Mengurangi dan mencegah anak lahir dengan berat badan rendah, anak pendek, dan kekurangan gizi pada anak-anak.
 - b) Meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui pengurangan pengeluaran, peningkatan produktifitas, dan pendapatan yang lebih tinggi.
- 3) Proyek Modernisasi Pengadaan:
 - a) Meningkatkan efisiensi dan penghematan pengadaan barang dan jasa pemerintah, menjamin ketersediaan barang/jasa secara tepat waktu, serta menyediakan pelayanan publik sesuai dengan yang direncanakan.
 - b) Melalui efisiensi dan penghematan akan diperoleh barang dan jasa dalam jumlah lebih banyak dan berkualitas, sehingga berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi.

Melalui ketiga proyek tersebut, diharapkan pendapatan rumah tangga makin tinggi akibat peningkatan produktifitas, pengurangan biaya energi, serta perbaikan pelayanan publik di sektor pengadaan barang dan jasa.

Secara umum kegiatan hibah MCC yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia sudah berjalan cukup baik, namun secara kumulatif penyerapan hibah ini masih relatif rendah. Berdasarkan capaian kinerja Satker Pengelola Hibah MCC, terdapat beberapa hal yang masih perlu ditindaklanjuti, yaitu:

- 1) Pencatatan nilai realisasi hibah MCC dalam bentuk SPHL.
- 2) Pemberian fasilitas penggantian pajak (PPH dan PPh) seperti yang dipersyaratkan dalam PMK 124/2012.
- 3) Berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Program MCA-I dalam percepatan proses pengelolaan aset, dan persiapan menuju *Compact End Date* (CED), serta *closing date*.
- 4) Melakukan kegiatan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan *Program Compact*.

Gambar 3.4 Dokumentasi Kegiatan Hibah Millenium Challenge Corporation



Selain beberapa hibah tersebut diatas, dalam triwulan ini juga disampaikan laporan proyek-proyek hibah lainnya, meskipun pelaporannya belum menyertakan uraian tentang capaian kinerja dari masing-masing proyek. Hibah luar negeri lainnya yang dilaporkan pelaksanaannya pada Triwulan IV Tahun 2017 berjumlah 78 proyek, yang dilaksanakan oleh 10 (sepuluh) Kementerian/Lembaga dengan total nilai sebesar ekuivalen USD 606,1 juta. Pemanfaatan Hibah Luar Negeri tersebut sebagian besar diarahkan untuk mendukung penanganan lingkungan hidup dan perubahan iklim, pengentasan kemiskinan, peningkatan kesehatan, mitigasi bencana, dan juga peningkatan kapasitas (*capacity building*).

Berdasarkan bentuk dan jenis hibah yang diterima oleh Kementerian/Lembaga tersebut, dapat dikelompokkan kedalam 3 (tiga) kategori, yaitu hibah terencana, hibah langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga, dan hibah langsung dalam bentuk uang.

Tabel 3.1 Pelaksanaan Hibah Luar Negeri (berdasarkan Bentuk dan Jenis)

(Ekuivalen Juta USD)

No.	Kode Hibah	Donor	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Nilai Hibah
HIBAH TERENCANA					
Badan Pengawasan Obat dan Makanan					
1	27TVWY8A	JICA	<i>Project for Ensuring Drug and Food Safety in the Republic of Indonesia</i>	29/11/2017 – 29/11/2017	4,2
2	2Q55U2FA	USAID	<i>Implementation of Intermediate Results 2.1 and 3.1 of USAID Assistance Agreement</i>	N/A	216,5
Kementerian Pertanian					
1	71697101	IFAD	<i>Smallholder Livelihood Development in Eastern Indonesian</i>	05/06/2011 – 31/06/2019	1,1
2	71113301	JICA	<i>Proyek CF-SKR Sustainable Horticulture Development in the Highland Area</i>	N/A	0,4
3	71113301	JICA	<i>Proyek CF-SKR The Improvement of Peanut and Sweet Potato's Production and Increasing in Farmer's Income</i>	N/A	0,3
HIBAH LANGSUNG BARANG/JASA/SURAT BERHARGA					
Badan Pemeriksa Keuangan					
1	73392601	KOICA	<i>Master Plan, Feasibility Study, and Basic Design for Drainage in Palembang City Project</i>	09/11/2012 – 31/12/2017	2,6
2	2Z5AGCBA	ADB	<i>Sewerage System Development Project</i>	29/05/2017 – 15/09/2018	1,2
Kementerian Kelautan dan Perikanan					
1	2PG6AJQA	KMOUC Korea	<i>The Establishment of Marine and Fisheries Scientific and Technical Cooperation on Abandoned Oil and Gas Platform</i>	05/06/2017 – 05/06/2019	0,1
2	FIS/2015/038	ACIAR / Australia	<i>Improving Seaweed Production and Processing Opportunities in Indonesia</i>	17/08/2016 – 31/07/2020	0,2
3	FIS/2010/101	Australia	<i>Improving Fish Health management and production protocols in marine finfish aquaculture in Indonesia and Australia</i>	01/07/2013 – 30/06/2017	0,3
Kementerian Kesehatan					
1	24M4LU9A	The Fred Hollows Foundation (FHF)	<i>The Fred Hollows Foundation (FHF)</i>	30/08/2017 – 31/03/2020	1,4
2	22TLMV1G	Christoffel Blindenmission (CBM)	<i>Kegiatan Dukungan Manajemen/Pertemuan/Sosialisasi/ Workshop/Barang di Direktorat P2MKJN untuk Program Kesehatan Jiwa dan Masyarakat</i>	N/A	0,2
3	26XYN5DM	JICS	<i>Japan's Non Project Grant Aid for Prvision of Medical Equipment</i>	N/A	0,5

No.	Kode Hibah	Donor	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Nilai Hibah
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat					
1	2K6Y21DB	KfW	<i>Consulting Services Overseas Training and Fact Finding Mission for Advance Solid Waste Management Technologies in the Context of Sustainable Human Settlements Development</i>	12/11/2014 –N/A	0,4
2	2TJLGRG6	KOICA	<i>The Project for Capacity Development for Safety Management of the Public Facilities in Indonesia</i>	01/11/2014 – 31/12/2017	1,8
3	21F1CGEY	KOICA	<i>Project for Establishment of Master Plan and Pilot System for Road Data Center Operation in Indonesia (IRODCO)</i>	17/12/2014 – 31/12/2017	3,0
4	'72211901	JICA	<i>The Project for Capacity Development of Jakarta Comprehensive Flood Management</i>	04/10/2010 – 27/01/2017	2,9
5	72825701	JICA	<i>Project for Post Earthquake Rehabilitation of Water Resources Management Facilities in Padang</i>	22/04/2010 – 27/01/2017	1,2
6	72979501	JICA	<i>Project on Building Administration and Enforcement Capacity Development for Seismic Resilience Phase 2</i>	25/06/2011 –N/A	4,1
7	2W889LFA	JICA	<i>Advisor for Sewerage Management (Transfer Knowledge on STP and Piping Management)</i>	23/09/2014 – 14/03/2017	0,2
8	73928801	KOICA	<i>Feasibility Study and Basic Engineering Design for Water Conveyance and Integrated Dam Operating System for Bandung Area</i>	01/03/2013 –N/A	3,0
9	71794001	KOICA	<i>Master Planning and Feasibility Study of the Karian Dam-Serpong Water Conveyance and Supply System</i>	10/02/2010 –N/A	1,5
10	70831901	Pemerintah China	<i>Additional Services for DED of Jatigede Dam Project</i>	14/10/2013 – 31/01/2017	4,8
11	75012601	JICA	<i>The Project for Construction of Bridges in The Province of Nusa Tenggara Barat, Phase III</i>	25/03/2014 – 28/02/2017	9,3
12	73282601	JICA	<i>Road Policy Advisory</i>	25/05/2010 – 25/05/2013	0,5
13	70881901	JICA	<i>The Project for Improvement of Bridges in Nias Island Project (DED)</i>	13/03/2009 –N/A	0,3
14	2Q52XZQA	Pemerintah Jepang	<i>Japan's Grant Aid Economic and Social Development Programme (Security System at Gelora Bung Karno)</i>	30/05/2017 – 31/12/2018	4,4
15	2FTW7VWA	JICA	<i>Advisor for Water Supply</i>	17/07/2014 – 18/07/2018	0,4
16	2BRWV45A	JICA	<i>The Project on Strengthening COE (Center of Excellence) Program for PDAMs in the Republic of Indonesia</i>	29/03/2016 – 28/02/2019	2,0
17	2NTJXYVA	JICA	<i>Skill Support Regarding Leak Prevention Initiative in Bandung City</i>	13/03/2017 – 13/11/2019	0,4
18	2MDTQ9DA	JICA	<i>Improvement of Water Purification Technology in Solok City</i>	31/05/2016 –N/A	0,4

(Ekuivalen Juta USD)

No.	Kode Hibah	Donor	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Nilai Hibah
19	2SMGBPSA	JICA	<i>Improvement of Tap Water Quality in Typical Peat Land Area of Bengkalis</i>	29/03/2016 – 28/02/2019	0,2
20	73949501	NUFFIC	<i>Capacity Buliding for High Standard Education and Training Programmes for The Water Supply Sector in Indonesia</i>	29/05/2013 – 31/05/2017	1,8
21	2ZLGZDGA	AFD	<i>Technical Assistance for Sanitation Sector in Bogor City</i>	28/02/2015 – 30/06/2017	0,2
22	2X25XCZ9	JICA	<i>The Project on Capacity Development for River Basin Organizations in Integrated Water Resources Management (Phase II)</i>	12/11/2015 – 11/11/2019	3,2
23	2YK9F68L	JICA	<i>The Project for Assessing and Integrating Climate Change Impacts into the Water Resources Management Plans</i>	20/04/2013 – 31/10/2017	5,5
24	28VDG4G3	KOICA	<i>Verification Survey with the Private Sector for Disseminating Japanese Technologies for Building the Rainwater Runoff Control System</i>	09/01/2015 –N/A	0,4
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi					
1	23H15VSG	GIZ	<i>Transforming Administration Strengthening Innovation</i>	01/04/2014 – N/A	7,1
Kementerian Pertanian					
1	74886401	FAO	<i>Strengthening and Revitalization of Integrated Pest Management Implementation and Pesticides Management System in Indonesia (TCP/INS/3403)</i>	Januari 2014 – N/A	0,4
2	2HHFZ6PA	JICA	<i>The Public Private Partnership Project for the Improvement of the Agriculture Product Marketing and Distribution System</i>	Maret 2016 – Maret 2020	4,8
3	27KXRJQA	<i>The Korea Agency of Education, Promotion and Information Service in Food, Agriculture, Forestry and Fisheries (EPIS)</i>	<i>Establishing National Agri-Food Information System and Developing Human Resources in Indonesia</i>	April – N/A	0,2
4	29RLUFDA	<i>Government of New Zealand</i>	<i>Indonesia-New Zealand Dairy Excellence Activity</i>	27/10/2011 – N/A	10,7
5	74527101	FAO	<i>Assistance to the Government of Indonesia for the Effective and Humane Control of Rabies in Indonesia, with Special Emphasis on Flores and Lembata Islands (OSRO/INS/302/WPA)</i>	September 2013 – N/A	0,7
6	2FYUT388	<i>Kedutaan Besar Belanda</i>	<i>Food Security Programme in Livestock Components</i>	25/07/2014 – N/A	5,0

(Ekuivalen Juta USD)

No.	Kode Hibah	Donor	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Nilai Hibah
7	74368801	DAFF	<i>Australia Indonesia Improved Animal Welfare Program 2012 - 2015 (IAWP)</i>	24/07/2013 – N/A	1,7
8	75013301	New Zealand	<i>Agricultural Quarantine Services Improvement (AQSI) Program</i>	2014 – N/A	2,5
9	2WYHAU15	UNDP	<i>Sustainable Palm Oil Initiative</i>	N/A	15,5
10	71465701	AUSAID	<i>Australia Indonesia Partnership for Emerging Infectious Disease Animal Health Program</i>	18/01/2011 – 03/12/2018	22,6
11	71723301	JICA	<i>Project on Capacity Development of Animal Health Laboratory</i>	15/07/2011 – N/A	2,2
12	72436401	FAO	<i>Enhancing the Capacity of the Government of Indonesia and Partner to Control Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI) (OSRO/INS/103/USA)</i>	N/A	20,7
13	72228801	JICA	<i>The Beef Cattle Development Project Utilization Lokal Resources in The Eastern Part of Indonesia</i>	11/11/2006 – N/A	4,2
14	71110201	Belanda	<i>The Indonesian-Dutch Partnership Programme Pertaining to HPAI Prevention and Control</i>	15/09/2006 – N/A	0,1
15	71109501	ACIAR / Australia	<i>Cost-effective Biosecurity for Non-Industrial Commercial Operation in Indonesia (ACIAR AH/2006/169)</i>	01/06/ 2008 – N/A	0,2
16	70857101	FAO	<i>Reinforcement and Expansion of the AI Participatory Disease Surveillance and Response Program in Indonesia (OSRO/INS/604/USA)</i>	Juni 2006 – N/A	44,2
17	72221901	FAO	<i>Assistant through FAO for the Control of Rabies in Indonesia (OSRO/INS/104/USA)</i>	27/10/2011 – N/A	0,5
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia					
1	21TE9CDA	JICA	<i>Innovative Bio-Production in Indonesia (IBIOL): Integrated Bio-Refinery Strategy to Promote Biomass Utilization Using Super Microbes for Fuels and Chemicals Production</i>	28/11/2013 – 27/11/2018	0,4
HIBAH LANGSUNG UANG					
Kementerian Pertanian					
1	74683301	AVRDC	<i>Vegetable Go to School</i>	01/01/2014 – N/A	0,2
2	2S36P8TA	FAO	<i>Promoting Sago Starch Utilization in Indonesia (TCP/INS/3503)</i>	Agustus 2015 – Juli 2017	0,3
3	70903301	UNEP - GEF - Bioversity International	<i>Conservation and Sustainable Use of Cultivated and Wild Tropical Fruit Diversity: Promoting Sustainable Livelihoods, Food Security and Ecosystem Services</i>	Desember 2008 – N/A	0,7
Kementerian Kesehatan					
1	70913301	GAVI	<i>Gavi (Global Alliance for Vaccine and Immunization) New Vaccine Support</i>	02/01/2015 – 31/12/2018	0,5
2	28D4S7SA	UNICEF	<i>Dana Bantuan (Hibah) UNICEF</i>	28/12/2020 – 01/01/2016	1,1

(Ekuivalen Juta USD)

No.	Kode Hibah	Donor	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Nilai Hibah
3	2E6AZTKA	The Global Fund to Fight Aids Tuberculosis and Malaria	Indonesia HIV Response: Accelerating the achievement of the 'Three Zeros	01/01/2016 – 31/12/2017	35,6
4	26KCA77A	The Global Fund	Toward an Indonesia Free of Tuberculosis	17/02/2016 – 31/12/2017	70,4
5	2W4KQU4A	The Global Fund	Indonesia HIV Response: Accelerating The Achievement of The Three Zeros (GA 946, IDN-H-NAC)	01/01/2016 – 31/12/2017	20,1
6	71791901	Netherlands Leprosy Relief	N/A	27/11/2014 – 27/11/2017	0,2
7	2PAHK2CA	UNFPA	N/A	29/03/2016 – 31/12/2017	4,9
8	2UFNLPSA	Union	Memperkuat Kebijakan Pengendalian Dampak Produk Tembakau di Tingkat Nasional dan Sub Nasional (Project - Indonesia - RI2 - 11c)	01/10/2016 – 30/09/2018	0,6
9	2BQSBMEA	UNFPA	Maternal Health, HIV SRH Linkages, and MISP	N/A	0,2
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Terlinggal dan Transmigrasi					
1	73951901	PSF	PNPM Support Facility Trust Fund	25/06/2013 – 31/12/2018	31,7
Kementerian Kelautan dan Perikanan					
1	FIS/2015/038	ACIAR / Australia	Improving Seaweed Production and Processing Opportunities in Indonesia	17/08/2016 – 31/07/2020	0,2
2	2D5NQ9UF	WCPCFC	Sustainable Management of Highly Migratory Fish Stocks in the West Pacific and East Asian Seas	28/10/2014 – 31/12/2017	0,3
3	28WNJQ8A	CSIRO	Enabling Enforcement Through Improved Use of Monitoring Information to Support Surveillance Activities	10/11/2016 – 31/12/2018	0,2
4	72878801	ACIAR / Australia	Developing Research Capacity for Management of Indonesia's Pelagic Fisheries Resources	06/08/2012 – 31/12/2017	0,3
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat					
1	7391701	JICS	Provision of Industrial Products for the Republic of Indonesia	30/04/2013 – 24/02/2017	4,4
Komisi Pemberantasan Korupsi					
1	22GF34VA	Pemerintah Jerman (BMZ)	Assistance in Preventing and Combating Corruption in Indonesia	01/07/2016 – 31/08/2018	2,4
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia					
1	27CMRY7A	Nanyang Technologic University of Singapore	The Sumatran GPS Array ("SuGAR")	23/05/2016 – 31/03/2017	0,1

(Ekuivalen Juta USD)

No.	Kode Hibah	Donor	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Nilai Hibah
2	2XZS961A	Nanyang Environment and Water Institute, Nanyang Technologic University Of Singapore	Project Improving the Quality of Life in Giriharja Tofu Production Community Through Biogas Production from Tofu Wastewater	01/01/2016 – 31/12/2017	0,2
3	TF015470	ADB	Coral Reef Rehabilitation and Management Program - Coral Triangle Initiative (COREMAP - CTI)	24/02/2014 – 30/06/2019	6,9
TOTAL					606,1

DAFTAR PROYEK PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2017 BERDASARKAN INSTANSI PENANGGUNG JAWAB

(Ekuivalen dalam Juta USD)

No	Kode loan	Lender	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Tanggal Tutup	Nilai Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan IV TA 2017	Pinjaman Belum Ditarik	TA 2017		
									Target	Realisasi	%
Badan Informasi Geospasial						56,6	55,5	1,1	0,0	0,0	0,0
1	IP-544	JICA	National Geo-Spatial Data Infrastructure Development Project	26-07-2007	26-07-2017	56,6	55,5	1,1	0,0	0,0	0,0
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan						57,8	46,0	11,8	18,8	10,9	58,0
<u>Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Sosial dan Keamanan</u>											
2	2927-INO	ADB	Strengthening Accountability Revitalization Project (STAR)	19-02-2013	30-06-2018	57,8	46,0	11,8	18,8	10,9	58,0
Badan Pengusahaan Batam						50,1	11,5	38,6	22,5	8,6	38,2
3	INA-20	Korea	Development of Sewerage System in Batam Island Project	29-12-2014	29-06-2019	50,1	11,5	38,6	22,5	8,6	38,2
Badan Pusat Statistik						47,0	12,2	34,8	7,7	8,5	110,1
<u>Direktorat Jenderal Bina Program</u>											
4	8038-ID	Bank Dunia	Statistical Capacity Building Change and Reform for the Development Statistic (Statcap-Cerdas)	18-07-2011	30-09-2017	47,0	12,2	34,8	7,7	8,5	110,1
Kementerian Agama						123,8	1,4	122,4	14,8	1,3	8,8
<u>Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam</u>											
5	IND-0164	IDB	The Support to Development of Islamic Higher Education Project (4 in 1)	18-05-2013	10-11-2018	123,8	1,4	122,4	14,8	1,3	8,8
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi						518,5	360,8	157,7	23,4	14,4	61,4
<u>Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</u>											
6	755-ID	IFAD	Village Development Programme	17-03-2009	31-03-2018	68,1	57,3	10,8	6,4	0,9	14,0
	GC-1053-ID	IFAD	Village Development Programme	17-03-2009	31-03-2018	0,4	0,1	0,3	0,2	0,0	0,0
7	8217-ID	Bank Dunia	Village Innovation Project	22-03-2013	31-12-2018	450,0	303,5	146,5	16,8	13,5	80,3

(Ekuivalen dalam Juta USD)

No	Kode loan	Lender	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Tanggal Tutup	Nilai Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan IV TA 2017	Pinjaman Belum Ditarik	TA 2017		
									Target	Realisasi	%
Kementerian Kelautan dan Perikanan						156,9	81,9	75,0	27,2	5,8	21,4
<u>Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil</u>											
8	880-ID	IFAD	Coastal Community Development Project (CCDP)	23-10-2012	31-12-2017	24,2	15,0	9,2	10,3	1,5	14,1
	E-16-ID	IFAD	Coastal Community Development Project (CCDP)	23-10-2012	31-12-2017	7,8	6,3	1,5	1,3	0,2	14,3
	I-C-1392-ID	IFAD	Coastal Community Development Project (CCDP)	23-10-2012	31-12-2017	2,0	1,4	0,6	0,6	0,1	19,0
9	8336-ID	Bank Dunia	Coral Reef Rehabilitation and Management Program-Coral Triangle Initiative (Coremap-CTI)	05-06-2014	30-06-2020	47,4	17,8	29,6	0,0	2,2	0,0
	3094-INO	ADB	Coral Reef Rehabilitation and Management Program-Coral Triangle Initiative (Coremap-CTI)	24-02-2014	31-12-2017	45,5	13,0	32,5	13,3	1,9	14,3
<u>Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan</u>											
10	CID 1025 01 C	Perancis (AFD)	Infrastructure Development Space Oceanography (INDESO)	18-06-2012	30-06-2017	30,0	28,4	1,6	1,6	0,0	0,0
Kementerian Ketenagakerjaan						32,5	27,2	5,3	24,1	24,0	99,5
<u>Direktorat Jenderal Pembinaan, Pelatihan, dan Produktifitas</u>											
11	IND-0159	IDB	Support to Quality Improvement of The Vocational Training Centers (VTC) Project	23-12-2013	30/06/2019	2,5	0,9	1,6	1,2	0,9	75,6
	IND-0160	IDB	Support to Quality Improvement of The Vocational Training Centers (VTC) Project	23-12-2013	23-12-2017	30,0	26,3	3,7	22,9	23,1	100,7
Kementerian Komunikasi dan Informatika						53,3	53,3	0,0	4,0	4,0	100,0
<u>Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika</u>											
12	21686401	Perancis	Improvement on TV Transmitting Stations (ITTS) - Phase II	31-12-2014	15-12-2018	53,3	53,3	0,0	4,0	4,0	100,0
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						4.805,1	2.409,8	2.395,3	665,2	504,8	75,9
<u>Sekretariat Jenderal</u>											
13	3455-INO	ADB	Accelerating Infrastructure Delivery through Better Engineering Services Project (ESP)	21-12-2016	30-06-2020	148,2	1,0	147,2	0,9	1,0	111,1

(Ekuivalen dalam Juta USD)

No	Kode loan	Lender	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Tanggal Tutup	Nilai Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan IV TA 2017	Pinjaman Belum Ditarik	TA 2017		
									Target	Realisasi	%
<u>Direktorat Jenderal Bina Marga</u>											
14	IP-545	JICA	Aceh Reconstruction Project	29-03-2007	26-07-2017	102,9	76,5	26,4	0,0	0,7	0,0
15	INA-17	Korea	Padang By-Pass Capacity Expansion Project	14-04-2011	14-12-2017	62,9	35,5	27,4	6,1	6,2	101,2
16	2817-INO	ADB	Regional Road Development Project (RRDP)	31-07-2012	31-07-2018	180,0	131,6	48,4	51,3	49,2	95,9
	IND-0161	IDB	Regional Road Development Project (RRDP)	29-04-2013	10-06-2019	65,0	23,9	41,1	12,5	10,3	82,4
17	IP-529	JICA	Tanjung Priok Access Road Construction Project I	28-07-2005	30-12-2017	233,4	158,9	74,5	7,5	18,6	249,2
18	201542 TTL 38	RR Tiongkok	Toll Road Development of Balikpapan Samarinda Section 5 Project	30-09-2016	30-09-2021	53,4	7,0	46,4	7,8	5,0	63,9
19	21662601	RR Tiongkok	Toll Road Development of Cileunyi-Sumedang-Dawuan (CISUMDAWU) Phase I	12-11-2012	21-12-2017	93,0	92,8	0,2	20,4	18,0	88,3
20	2016 1 TTL 389	RR Tiongkok	Toll Road Development of Cileunyi-Sumedang-Dawuan (CISUMDAWU) Phase II	30-09-2016	30-09-2022	219,4	37,3	182,1	33,6	33,4	99,4
21	2016 7 TTL 395	RR Tiongkok	Toll Road Development of Manado-Bitung	30-09-2016	30-09-2022	78,1	12,0	66,1	9,9	7,9	80,3
22	21663301	RR Tiongkok	Toll Road Development of Medan - Kualanam	11-03-2013	11-03-2018	122,4	72,6	49,9	30,7	23,1	75,4
23	201539 TTL 38	RR Tiongkok	Toll Road Development of Solo-Kertosono Phase I Project	30-09-2016	30-09-2021	198,8	59,5	139,3	47,8	47,8	100,0
24	8043-ID	Bank Dunia	Western Indonesia National Roads Improvement (WINRIP)	12-03-2012	31-12-2018	250,0	120,2	129,8	51,8	29,9	57,7
<u>Direktorat Jenderal Cipta Karya</u>											
25	8259-ID	Bank Dunia	Additional Financing to the Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities Project (PAMSIMAS II)	02-08-2013	30-11-2018	99,9	81,1	18,8	3,7	0,0	0,0
26	8578-ID	Bank Dunia	Additional Financing to the Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities Project (PAMSIMAS III)	22-08-2016	31-12-2020	300,0	47,2	252,8	49,4	39,1	79,3
27	2010 66 471	Jerman (KfW)	Emission Reduction in Cities : Solid Waste Management	02-05-2013	30-06-2018	83,3	2,3	81,1	13,8	0,0	0,0
28	HS002 16000	Hongaria	IKK Water Supply Program and Small Water Treatment Plant for Water Scarcity Areas	01-08-2016	31-12-2020	36,4	7,7	28,7	8,5	7,7	90,6

(Ekuivalen dalam Juta USD)

No	Kode loan	Lender	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Tanggal Tutup	Nilai Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan IV TA 2017	Pinjaman Belum Ditarik	TA 2017		
									Target	Realisasi	%
29	2654-INO	ADB	Metropolitan Sanitation Management and Health Project (MSMHP)	22-11-2010	31-12-2019	35,0	22,1	12,9	2,1	0,0	0,0
30	IP-565	JICA	Metropolitan Sanitation Management Investment Program: Sewerage System Development in DKI Jakarta	23-06-2014	23-06-2021	17,5	1,3	16,2	2,2	1,3	58,8
31	3123-INO	ADB	Metropolitan Sanitation Management Investment Project (MSMIP)	09-07-2014	31-12-2020	80,0	1,7	78,3	10,8	1,7	15,7
	8280-INO	AIF	Metropolitan Sanitation Management Investment Project (MSMIP)	09-07-2014	31-12-2020	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
32	8213-ID	Bank Dunia	National Community Empowerment Program in Urban Areas (PNPM Urban) 2012-2015	01-03-2013	31-12-2018	266,0	257,6	8,4	18,3	16,6	90,9
		IDB	National Slum Upgrading Project	18-09-2016	04-05-2021	8,0	2,0	6,0	0,2	2,0	952,4
33	IND-0174	IDB	National Slum Upgrading Project	18-09-2016	09-05-2021	311,8	72,9	238,9	32,1	72,9	227,2
		IDB	National Slum Upgrading Project	18-09-2016	22-11-2021	10,0	0,7	9,3	0,0	0,7	0,0
34	3122-INO	ADB	Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2)	17-07-2014	31-12-2019	74,4	58,6	15,8	36,9	24,7	66,9
	IND-0169	IDB	PNPM ICDD Phase III	15-12-2013	31-12-2017	187,0	170,5	16,5	13,0	0,0	0,0
35	IND-0170	IDB	PNPM ICDD Phase III	15-12-2013	31-12-2017	8,0	6,1	1,9	1,3	0,0	0,0
	IND-0171	IDB	PNPM ICDD Phase III	15-12-2013	31-12-2017	10,0	8,3	1,7	1,3	0,0	0,0
36	IP-564	JICA	Rural Settlement Infrastructure and Kabupaten Strategic Areas Development (RISE II)	23-06-2014	23-06-2019	89,0	84,8	4,2	0,1	0,1	98,5
37	IND-0167	IDB	SANIMAS Community-Based Sanitation Project In Indonesia	29-10-2014	29-10-2019	100,0	38,3	61,7	21,4	22,5	105,0
38	DNI-00805-023-T	Spanyol	Small Scale Water Treatment Plants for Emergency Relief (SSWTP-ER)	02-08-2016	07-05-2018	15,5	2,3	13,2	15,5	2,3	15,1
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air											
39	21595701-31	RR Tiongkok	Additional Loan for Jatigede Dam	03-09-2013	09-01-2017	117,0	117,0	0,0	0,0	0,0	0,0

(Ekuivalen dalam Juta USD)

No	Kode loan	Lender	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Tanggal Tutup	Nilai Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan IV TA 2017	Pinjaman Belum Ditarik	TA 2017		
									Target	Realisasi	%
40	INA-19	Korea	Construction of Karian Multipurpose Dam Project	14-02-2012	22-03-2019	104,3	34,3	70,0	22,7	7,1	31,2
41	IP-552	Jepang (JICA)	Countermeasure for Sediment in Wonogiri Multipurpose Dam Reservoir I	28-07-2009	28-07-2018	53,8	46,9	6,9	11,0	9,9	90,0
42	IP-567	Jepang (JICA)	Countermeasure for Sediment in Wonogiri Multipurpose Dam Reservoir II	23-06-2014	23-06-2021	44,0	4,9	39,0	4,6	2,4	51,5
43	7669-ID	Bank Dunia	Dam Operational Improvement and Safety Project (DOISP)	08-06-2009	30-06-2017	50,0	45,7	4,3	3,0	0,3	11,2
44	8711-ID	Bank Dunia	Dam Operational Improvement and Safety Project (DOISP) PHASE II	04-08-2017	30-06-2023	125,0	0,1	124,9	0,5	0,1	25,0
45	3440-INO	ADB	Flood Management in Selected River Basin	09-12-2016	31-12-2022	108,7	2,0	106,7	16,3	2,0	12,3
46	8121-ID	Bank Dunia	Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (JUFMP)	18-08-2012	28-02-2019	139,6	79,4	60,3	12,7	4,3	33,8
47	IP-522	Jepang (JICA)	Lower Solo River Improvement Project II	28-07-2005	30-09-2017	82,9	75,1	7,8	4,3	3,7	85,9
48	IP-546	Jepang (JICA)	Participatory Irrigation System Improvement Project	25-07-2008	25-10-2017	109,2	108,8	0,4	2,4	2,4	100,0
49	IP-559	Jepang (JICA)	Upper Citarum Basin Flood Management	25-07-2013	25-07-2020	29,4	7,0	22,3	10,4	4,3	41,5
50	IP-551	Jepang (JICA)	Urban Flood Control System Improvement in Selected Cities	28-07-2009	28-12-2018	66,5	51,8	14,7	5,4	2,6	48,3
51	IP-566	Jepang (JICA)	Urgent Disaster Reduction Project for Mount Merapi and Lower Progo River Area - Phase II	23-06-2014	23-06-2021	45,4	31,5	13,9	15,4	15,4	99,8
52	8027-ID	Bank Dunia	Water Resources and Irrigation Sector Management (WISMP II)	14-11-2011	31-12-2018	150,0	111,1	38,9	45,7	7,5	16,4
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan						21,1	20,8	0,3	1,4	1,4	100,0
<u>Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah</u>											
53	2007 66 071	Jerman (KfW)	Sustainable Economic Development through Technical and Vocational Education and Training	15-12-2011	30-06-2017	21,1	20,8	0,3	1,4	1,4	100,0

(Ekuivalen dalam Juta USD)

No	Kode loan	Lender	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Tanggal Tutup	Nilai Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan IV TA 2017	Pinjaman Belum Ditarik	TA 2017		
									Target	Realisasi	%
Kementerian Perhubungan						755,0	188,4	566,6	171,1	58,9	34,4
<u>Direktorat Jenderal Perhubungan Laut</u>											
54	IND-0133	IDB	The Development of Belawan Port Project Phase I	01-05-2010	05-04-2018	87,6	15,1	72,5	20,9	4,3	20,6
<u>Direktorat Jenderal Perkeretaapian</u>											
55	21671901	Perancis (NATIXIS)	Bandung Urban Railway Transport Development, Electrification Padalarang-Cicalengka Line	04-06-2013	30-06-2018	88,9	0,0	88,9	6,5	0,0	0,0
	CID 1029 01G	AFD	Bandung Urban Railway Transport Development, Electrification Padalarang-Cicalengka Line	04-06-2013	31-03-2018	51,7	0,0	51,7	3,7	0,0	0,0
56	IP-563	JICA	Jabodetabek Railway Capacity Enhancement-Phase I	23-06-2014	20-06-2021	144,8	0,0	144,8	0,3	0,0	0,0
57	(2016) 23	RR Tiongkok	Procurement of Track Material and Turnout Phase I	24-01-2017	24-01-2020	175,1	10,3	164,8	62,4	10,3	16,5
58	IP-508	JICA	Railway Electrification and D.D.Tracking Project I	13-12-2001	11-09-2017	207,0	163,0	44,0	77,3	44,3	57,3
Kementerian Pertanian						129,1	99,2	29,9	26,9	19,7	73,1
<u>Badan Ketahanan Pangan</u>											
59	835-ID	IFAD	Smallholder Livelihood of Development In Eastern Indonesia (SOLID)	05-07-2011	31-07-2019	49,1	45,4	3,7	11,1	5,5	49,3
<u>Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian</u>											
60	8188-ID	Bank Dunia	Sustainable Management of Agricultural Research and Technology Dissemination (SMART-D)	25-10-2012	30-06-2019	80,0	53,8	26,2	15,8	14,2	89,8
Kementerian PPN/Bappenas						175,4	136,8	38,6	28,5	26,1	91,6
<u>Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana</u>											
61	IP-568	Jepang (JICA)	Profesional Human Resources Development IV	23-06-2014	23-06-2023	62,8	26,1	36,7	10,7	8,8	82,4
<u>Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas</u>											
62	8010-ID	Bank Dunia	Scholarships Program for Strengthening Reforming Institution (SPIRIT)	16-06-2011	31-12-2017	112,7	110,7	1,9	17,8	17,3	97,2

(Ekuivalen dalam Juta USD)

No	Kode loan	Lender	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Tanggal Tutup	Nilai Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan IV TA 2017	Pinjaman Belum Ditarik	TA 2017		
									Target	Realisasi	%
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi						946,1	424,9	521,2	199,8	107,1	53,6
<u>Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi</u>											
63	IP-553	JICA	Development of Bandung Institute of Technology III	28-07-2009	28-07-2018	50,2	31,8	18,4	7,5	3,8	50,1
64	IP-549	JICA	Development of World Class University at University of Indonesia	25-07-2008	15-07-2018	129,9	98,6	31,3	38,1	25,0	65,7
65	IP-541	JICA	Hasanuddin University Engineering Faculty Development	26-07-2007	26-07-2019	69,2	62,3	6,9	9,9	6,0	60,9
66	2928-INO	ADB	Polytechnic Education Development Project	07-02-2013	31-12-2019	75,0	42,2	32,8	12,8	9,3	72,7
67	IND-0177	IDB	The Development of Four Higher Education Institutions Project	06-11-2016	09-06-2021	13,9	2,3	11,6	1,4	2,5	174,8
	IND-0178	IDB	The Development of Four Higher Education Institutions Project	06-11-2016		162,6	0,0	162,6	0,2	0,0	0,0
68	IND-0137	IDB	The Development of Medical Education and Research Center and Two University Hospitals (3 in 1)	26-02-2011	30-06-2017	31,3	19,7	11,6	6,2	6,1	97,7
	IND-0138	IDB	The Development of Medical Education and Research Center and Two University Hospitals (3 in 1)	26-02-2011	30-06-2017	32,7	28,8	3,9	4,4	1,9	43,2
	SFD/8/526	Saudi Fund	The Development of Medical Education and Research Center and Two University Hospitals (3 in 1)	28-11-2010	31-12-2017	36,0	22,7	13,3	4,5	0,0	0,0
69	IND-0140	IDB	The Quality Improvement of Padjadjaran University Project	24-07-2011	31-12-2018	26,8	21,5	5,3	2,9	0,0	0,0
70	IND-0155	IDB	The Reconstruction and Upgrading of The State University of Padang (UNP) Project	28-11-2011	31-12-2017	24,6	20,4	4,2	6,3	6,2	98,4
	IND-0156	IDB	The Reconstruction and Upgrading of The State University of Padang (UNP) Project	28-11-2011	31-12-2017	4,9	4,4	0,5	4,6	4,3	94,5
71	IND-0168	IDB	The Support to The Development of Higher Education Project (7 in 1)	14-04-2014	28-10-2018	174,0	25,8	148,2	72,3	24,8	34,3
	SFD/9/612	Saudi Fund	The Support to The Development of Higher Education Project (7 in 1)	15-09-2014	31-12-2018	35,0	2,5	32,5	11,0	2,5	22,7
<u>Sekretariat Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi</u>											
72	8245-ID	Bank Dunia	Research and Innovation in Science and Technology Project (RISET-Pro)	12-06-2013	31-12-2020	80,0	41,9	38,1	17,8	14,8	83,0

(Ekuivalen dalam Juta USD)

No	Kode loan	Lender	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Tanggal Tutup	Nilai Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan IV TA 2017	Pinjaman Belum Ditarik	TA 2017		
									Target	Realisasi	%
Kepolisian Republik Indonesia						75,1	23,0	52,1	16,5	14,4	87,0
73	INA-21	Korea	Fast Patrol Boats for Indonesian National Police	15-07-2014	21-01-2018	35,0	22,5	12,5	14,5	14,4	98,8
74	INA-18	Korea	Integrated Trunking Radio Communication for Indonesian National Police	14-02-2012	22-11-2018	40,1	0,5	39,6	2,0	0,0	0,0
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia						16,3	16,1	0,2	4,3	3,7	85,3
75	LA 15.04.2011	Spanyol	Animal Husbandry Technology and Practices Improvement to Accelerate Meat and Milk Production	20-10-2011	30-06-2017	16,3	16,1	0,2	4,3	3,7	85,3
PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)						4,6	3,7	0,9	1,2	0,9	80,9
76	8192-ID	Bank Dunia	Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF)	12-06-2013	31-12-2018	4,6	3,7	0,9	1,2	0,9	80,9
PT. PERTAMINA						414,3	186,7	227,6	34,6	29,5	85,3
77	8082-ID	Bank Dunia	Geothermal Clean Energy Investment Project	29-06-2012	31-12-2018	175,0	139,1	35,9	20,9	20,8	99,4
78	IP-557	Jepang (JICA)	Lumut Balai Geothermal Power Plant Project	25-10-2011	25-10-2019	239,3	47,6	191,7	13,8	8,8	63,8
PT. PLN						2.643,0	991,0	1.652,0	336,8	358,9	106,6
79	IP-532	Jepang (JICA)	Asahan Hydroelectric Power Plant III	26-06-2008	31-12-2022	245,3	10,1	235,2	0,7	0,6	89,5
80	IP-555	Jepang (JICA)	Engineering Services for Java-Sumatra Interconnection	31-03-2010	31-03-2019	34,5	14,0	20,5	1,7	1,0	58,6
81	7940-ID	Bank Dunia	Indonesia Power Transmission Development Project (PTD I)	30-05-2011	30-06-2018	205,0	140,5	64,5	0,0	33,4	0,0
82	IP-561	Jepang (JICA)	Indramayu Coal Fired Power Plant Project (E/S)	23-10-2013	23-10-2022	15,3	4,4	10,9	4,0	3,3	82,1
83	3083-INO	ADB	Java-Bali 500 Kilovolt Power Transmission Crossing Project	29-09-2014	30-09-2019	224,0	13,6	210,4	35,9	11,7	32,6
	8276-INO	ADB/AIF	Java-Bali 500 Kilovolt Power Transmission Crossing Project	29-09-2014	30-09-2019	25,0	1,5	23,5	3,9	1,3	33,3
84	IP-556	Jepang (JICA)	Java-Sumatera Interconnection Transmission Line Project	26-03-2013	30-04-2022	328,3	15,1	313,1	0,1	0,0	0,0

(Ekuivalen dalam Juta USD)

No	Kode loan	Lender	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Tanggal Tutup	Nilai Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan IV TA 2017	Pinjaman Belum Ditarik	TA 2017		
									Target	Realisasi	%
85	IP-539	Jepang (JICA)	North-West Sumatera Inter-Connector Transmission	29-01-2009	29-01-2017	143,0	89,1	53,9	2,4	2,3	96,6
86	EXIM PBC 330	RR Tiongkok	Pangkalan Susu Coal Fired Steam Power Plant	03-06-2015	03-06-2020	373,0	119,2	253,8	81,4	99,6	122,3
87	21661901	RR Tiongkok	Parit Baru Coal Fired Steam Power Plant Project	02-05-2013	02-05-2018	132,2	93,3	38,9	28,3	26,6	94,0
88	IP-538	Jepang (JICA)	Peusangan Hydroelectric PP Construction Project	29-01-2009	29-01-2019	230,9	153,1	77,8	35,6	34,8	97,8
89	IP-537	Jepang (JICA)	PLN Operation Improvement System for Supporting Generation Facilities	29-01-2009	29-01-2018	39,9	2,5	37,4	0,0	0,0	0,0
	26180	Jerman (Kfw)	Scattered Transmission & Subst. Project (P. 3)	05-12-2014	31-05-2019	19,5	0,0	19,5	13,6	0,0	0,0
90	CID 1039 01H	Perancis (AFD)	Scattered Transmission & Subst. Project (P. 7)	25-07-2014	30-06-2018	20,0	1,1	18,9	7,3	0,0	0,0
	28221000	Jepang (JBIC)	Scattered Transmission & Subst. Project (P. 8)	19-11-2012	30-07-2018	18,3	2,0	16,3	9,1	2,0	22,2
91	8280-ID	Bank Dunia	Scattered Transmission Line and Substation in Indonesia Phase II (IPTD II)	26-03-2014	31-12-2019	159,6	39,2	120,4	0,0	18,4	0,0
92	CID 1024 01B	Perancis (AFD)	Strengthening West Kalimantan Power Grid	08-02-2013	30-06-2018	49,5	38,9	10,6	4,5	0,0	0,0
	3015-INO	ADB	West Kalimantan Power Grid Strengthening Project	04-04-2014	30-06-2018	49,5	31,8	17,7	0,9	3,2	372,9
93	EXIM PBC 329	RR Tiongkok	Takalar Coal Fired Steam Power Plant	29-04-2015	29-04-2020	241,0	169,3	71,7	80,2	101,3	126,4
94	IP-560	Jepang (JICA)	Tulehu Geothermal Power Plant Project (E/S)	23-10-2013	23-10-2022	45,3	19,5	25,8	27,1	18,2	67,2
95	8057-ID	Bank Dunia	Upper Cisokan Pumped Storage Hydro Electrical Power (1.040 MW)	01-05-2012	31-12-2018	44,0	32,7	11,3	0,0	1,1	0,0
PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI)						400,0	99,9	300,1	0,0	0,0	0,0
96	8715-ID	Bank Dunia	Additional Financing For Indonesia Infrastructure Finance Facility Project	26-09-2017	28-02-2022	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
97	7731-ID	Bank Dunia	Indonesia Infrastructure Finance Facility (IIFF)	25-04-2011	31-03-2017	100,0	99,9	0,1	0,0	0,0	0,0

(Ekuivalen dalam Juta USD)

No	Kode loan	Lender	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Tanggal Tutup	Nilai Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan IV TA 2017	Pinjaman Belum Ditarik	TA 2017		
									Target	Realisasi	%
98	8714-ID	Bank Dunia	Regional Infrastructure Development Fund (RIDF)	25-09-2017	31-12-2020	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Pemintah Provinsi DKI Jakarta						1.094,8	599,2	495,5	221,9	219,0	98,7
99	IP-554	JICA	Construction of Jakarta Mass Rapid Transit Project	28-07-2009	28-07-2019	427,3	426,4	0,9	65,2	64,4	98,7
100	IP-571	JICA	Construction of Jakarta Mass Rapid Transit Project Phase II	31-03-2016	31-03-2022	667,5	172,8	494,6	156,7	154,6	98,7
Lembaga Penjamin Kredit Ekspor/Kredit Swasta Asing (LPKE/KSA)						4.730,7	3.185,0	1.545,7	978,9	580,6	59,3
Total						17.307,0	9.034,3	8.272,7	2.829,5	2.002,5	70,8

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
JL. TAMAN SUROPATI NO. 2 JAKARTA PUSAT - 10310
TELP. (021) 3193 6207 FAX (021) 3145 374
WWW.BAPPENAS.GO.ID**